

# IMPLEMENTASI PENDIDIKAN PERDAMAIAN (*PEACE EDUCATION*) DALAM RANGKA TRANSFORMASI KONFLIK DI THAILAND SELATAN\*

Dr. Hj. Helmiati, M.Ag

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*“Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defence of peace must be constructed.” (UNESCO Constitution, 1945)*

*Karena perang dimulai dari pikiran manusia, maka dari pikiran manusialah perjuangan terhadap perdamaian harus dilakukan.”(Konstitusi UNESCO 1945)*

*There can never be peace between nations until it is first known that true peace is within the souls of men (Oglala Sioux)*

Konflik di Thailand Selatan telah berlangsung lama dan menyebabkan banyak korban jiwa. Konflik ini terjadi lebih dari 100 tahun terakhir. Hingga kini, ketegangan dan kekerasan sewaktu-waktu masih terjadi dan belum ada kecenderungan kekerasan fisik dan insiden pengeboman akan berakhir karena dialog formal melalui negosiasi politik mengalami jalan buntu dan karena rasa ketidakadilan menimbulkan kekerasan yang berkelanjutan. Hanya intensitasnya yang kadang meningkat dan kadang berkurang. Dari 1979 sampai akhir 2003, misalnya, 233 kematian dikaitkan dengan kekerasan politik di tiga provinsi Pattani, Yala dan Narathiwatt. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, tepatnya tahun 2004 terjadi peristiwa berdarah di Takbai yang menyebabkan 78 orang meninggal dunia.<sup>1</sup> Pada tahun yang sama ‘pembantaian ratusan Muslim’ oleh militer kembali terjadi di sebuah masjid di Thailand Selatan. Berikutnya, konflik dan kekerasan silih berganti terjadi. Pemberontakan kembali berkobar pada Januari 2004 sampai 2010. Tercatat 9.446 insiden kekerasan terjadi dalam rentang waktu tersebut, yang mengakibatkan 4.100 orang meninggal dan 6.509 korban luka.<sup>2</sup>

Konflik sosial ~menurut Laderach~ muncul dan berkembang atas dasar makna dan interpretasi sehingga orang-orang yang terlibat konflik melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan pandangan tersebut, konflik terhubung ke makna yang berarti pengetahuan. Pengetahuan berakar pada budaya. Budaya karenanya, digunakan oleh

---

• Laporan Penelitian pada LPPM UIN Suska Riau tahun 2017

<sup>1</sup>. Peristiwa berdarah pada 24 Oktober 2004, di bulan Ramadan itu mengundang kecaman internasional dan semakin meningkatkan intensitas konflik dan kerusuhan di Thailand Selatan. Lihat, [https://ms.wikipedia.org/wiki/Peristiwa\\_berdarah\\_Tak\\_Bai](https://ms.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_berdarah_Tak_Bai) diakses pada 12 Juli 2016.

<sup>2</sup>. Srisompob Jitpiromomsri, “The Southern Thai Conflict Six Years On: Insurgency, Not Just Crime”, *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol. 32, No 2, August 2010, hlm. 157; Brain Mc Cartan and Shawn W Crispin, “An Atol Investigation, Southern Test for New Thai Leader”, [http://www.atimes.com/atimes/Southeast\\_Asia/JL2Aeo2.html](http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/JL2Aeo2.html) (accessed December 23, 2008). Lihat juga Neil J. Melvin, *Conflict in Southern Thailand*, hlm. 9.

sekelompok orang untuk menafsirkan, mengungkapkan, dan menanggapi realitas sosial, dan mereka merasa 'yang lain/*the other*' bertentangan dengan norma-norma budaya/agamanya. Pondasi kekerasan struktural dan kultural yang diperkuat oleh perbedaan agama, etnis, kelas sosial, bahasa, sejarah dan silsilah, berkontribusi pada prasangka terhadap '*the other*'. "Perasaan ini dapat diungkapkan melalui berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, seperti rasisme, etnosentrisme, chauvinisme, stereotipe, terorisme, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Konflik dan kekerasan dapat menimbulkan dampak psikologis yang negatif, seperti perasaan tertekan, stress, kehilangan rasa percaya diri, rasa frustrasi, cemas, dan takut. Hal ini dapat terjadi pada pribadi-pribadi individu yang tidak tahan menghadapi situasi konflik. Selain itu juga dapat mematikan semangat kompetisi dalam masyarakat karena pribadi yang mendapat tekanan psikologis akibat konflik cenderung pasrah dan putus asa. Selain itu, tidak jarang tatanan sosial, institusi keluarga, agama, sekolah, dan sistem kesehatan, terkoyak satu persatu.

Konflik juga berdampak secara signifikan pada anak-anak. Hasil studi WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, anak-anak mengalami trauma psikologis sepanjang konflik bersenjata, mengingat mereka mengalami peristiwa traumatik seperti kehilangan ayah atau anggota keluarga yang lain, mengalami kesenjangan dalam mendapatkan perlindungan dan perawatan; menyaksikan penculikan, penahanan, pemenjaraan anggota keluarga, atau pengambilan anggota keluarga secara paksa dari rumah mereka; menyaksikan kekerasan ekstrim, mengalami penindasan secara kultural, putus sekolah serta tidak adanya kepastian masa depan.

Konflik dan kekerasan fisik dapat menyebabkan pemenuhan hak-hak emosional anak dan generasi muda jadi terampas.

“Konflik bersenjata melanggar hak atas hidup, hak atas keluarga dan masyarakat, hak atas kesehatan, hak atas pengembangan pribadi dan hak untuk mendapatkan pengasuhan dan perlindungan. Pelanggaran hak tersebut telah mengacaukan jaringan sosial dan hubungan utama yang mendukung pengembangan fisik, emosi, moral, pengetahuan, dan sosial anak-anak dan generasi muda”.<sup>4</sup>

Meski dampak konflik bersenjata lebih mendalam dirasakan anak-anak, mereka tetap potensial menjadi agen perdamaian.

“Pendekatan tradisional yang *top-down* dan mempunyai fokus yang terbatas yakni memberikan bantuan (*charity*), namun justru meruntuhkan potensi dan kapasitas individual dan komunitas untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah. Model pendekatan ini tidak menyelesaikan persoalan

---

<sup>3</sup>. John Paul Lederach, *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures*, (Syracuse University Press, 1995).

<sup>4</sup>. General Assembly United Nation, *Promotion and Protection of the Rights of Children, Impact of armed conflict on children*, Fifty-first session, Item 108 of the provisional agenda, A/51/306 26 August 1996, hlm., 9

konflik secara mendasar. Dengan kata lain akar masalah konflik akan menjadi pemicu konflik di masa yang akan datang dan tidak tersentuh”.<sup>5</sup>

Lebih jauh, anak dan generasi yang hidup dalam situasi konflik dan kekerasan dikhawatirkan akan mereproduksi kekerasan di masa depan seperti dijelaskan Graça Machel:<sup>6</sup> "Anak-anak yang tumbuh-kembang dalam iklim kekerasan akibat konflik seperti penculikan, teror, dan pembunuhan, di masa dewasanya cenderung melanggengkan siklus perang dan kekerasan pada generasi yang akan datang."

Karena itu, dibutuhkan kemampuan dan keterampilan mengatur keberagaman dan mengelola konflik tersebut agar semua komponen masyarakat dapat hidup dengan aman, nyaman, tenteram, dan damai bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketidakmampuan mengelola pluralisme dan konflik dapat mendorong perpanjangan konflik sosial politik. Konsekuensi lebih jauh adalah keterpurukan dan ketertinggalan. Karena itu transformasi konflik menjadi sebuah keniscayaan. Dalam hal ini, pendidikan dapat menjadi piranti lunak yang dapat membebaskan mereka dari trauma dan menumbuhkan bermacam sikap yang mendukung tercapainya perdamaian seperti sikap empati, simpati, toleransi, saling menghormati, saling menghargai, dan tolong-menolong antar sesama tanpa memandang agama, suku dan golongan serta membentuk generasi masa depan guna mendukung nilai-nilai perdamaian dan menyebarkanluaskannya ke dalam komunitas terdekat di lingkungannya ataupun global. Singkatnya perlu dilakukan intervensi melalui pendidikan perdamaian terhadap warga khususnya anak-anak dan generasi muda yang terpapar konflik agar mereka pada masa depan berperan sebagai aktor penebar nilai dan perilaku damai.

Di sinilah letak urgensi pendidikan perdamaian di lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal mulai dari tingkat dasar sampai ke level pendidikan tinggi (*higher education*) sehingga ke depan diharapkan anak-anak dan generasi muda berperan sebagai penyebar dan pelaku perdamaian.

Dietrich dan Sutzl menegaskan bahwa penanganan kekerasan struktural dan budaya memerlukan visi perdamaian yang pluralistik, pandangan yang berkeadilan sehingga diharapkan dapat menghilangkan konflik, mengurangi kekerasan dan meningkatkan keadilan dalam hubungan manusia.<sup>7</sup> Lederach lebih membahasakan” upaya semacam itu dengan transformasi konflik, yaitu proses perubahan secara konstruktif baik pada level personal, relasional, struktural dan kultural,<sup>8</sup> dimana hal ini dapat diupayakan melalui implementasi pendidikan perdamaian. Mengingat

---

<sup>5</sup>. Pat Pridmore, Priya Coomaraswamy, Vesna Dejanovic, *Partisipasi Anak-Anak Dalam Situasi Konflik dan Bencana dalam Anak-Anak Membangun Kesadaran Kritis*, (Yogyakarta, REaD Book, 2002), hlm. 325.

<sup>6</sup>. Graça Machel DBE adalah politikus Mozambik dan aktivis kemanusiaan. Dia adalah janda dari mantan presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. OECD, *The DAC Guidelines Helping Prevent Violent Conflict*, OECD Publications, Paris, Perancis, 2001, hlm. 25.

<sup>7</sup>. Wolfgang Dietrich/Wolfgang Sutzl, *A Call for Many Peaces*, (Peace Centre Burg Schlaining, November 1997).

<sup>8</sup>. John Paul Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation; Clear Articulation of the Guiding Principles By a Pioneer in The Field*, (Skyhorse Publishing, 2003)

pendidikan adalah pilar utama dalam transformasi nilai-nilai serta pembentukan karakter. Sebaliknya melalui pendidikan, nilai dan budaya damai dapat ditanamkan dan pribadi berkarakter yang mencintai serta berperilaku damai semestinya bisa diwujudkan.

Ketika kondisi masyarakat dilanda konflik dan kekerasan serta hilangnya rasa aman dan damai, pendidikan dinilai sebagai sektor yang bertanggung jawab karena dipandang telah gagal menghasilkan masyarakat yang baik, karena idealnya institusi pendidikan menjadi sarana utama dalam menginternalisasikan nilai-nilai karakter yang berkontribusi pada terwujudnya perdamaian. Argumen ini mengingatkan institusi pendidikan berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab “menumbuhkan dan memperdalam cinta pada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan, dan rasa kesetiakawanan sosial”. Karena itu pendidikan perdamaian (*Peace Education*) merupakan salah satu solusi vital dan menjanjikan untuk mentransformasi dan menyelesaikan konflik di Thailand selatan. Dalam rangka penyelesaian konflik, pemerintah sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya. Namun demikian, masih banyak fokusnya pada masalah keamanan dengan meningkatkan kekuatan pasukan militer, menerapkan hukum dan reorganisasi lembaga pemerintah. Karena itu, usaha ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kebijakan pemerintah di atas nampaknya dapat mengurangi kekerasan selama beberapa waktu, tetapi ketegangan dan akar penyebab konflik masih belum terselesaikan, mengingat konflik ini telah terjadi dalam waktu yang relatif panjang dan berdampak luas dalam masyarakat berupa kesenjangan sosial, ketertinggalan dalam bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur, sarana dan prasarana layanan publik dan lain sebagainya<sup>9</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah saja tidak bisa menyelesaikan masalah. Dengan demikian, masyarakat sipil diperlukan untuk terlibat dalam membangun perdamaian di kawasan itu. Salah satunya melalui sektor pendidikan. Seperti dikatakan praktisi pendidikan, Maria Montessori: politik hanya dapat menghindarkan kita dari perang. Penciptaan perdamaian adalah tugas pendidikan.

Terkait dengan Thailand Selatan, menurut Kumpee Thongpoon, di Universitas Chulalongkorn ada program studi perdamaian dan studi konflik berdurasi 3 bulan yang disponsori oleh *Rotary Club International*.<sup>10</sup> Ini menarik untuk diteliti lebih jauh untuk melihat efektivitas program tersebut dan meneliti tentang kekuatan potensi pendidikan perdamaian dalam program tersebut dalam mentransformasi konflik. Sehingga dapat dinilai kemungkinan untuk dijadikan model bagi perguruan tinggi lain di Selatan. Selain itu, menurutnya ada sedikit kurikulum pendidikan yang berfokus pada pendidikan perdamaian pada Perguruan Tinggi di Selatan.<sup>11</sup> Misalnya akademisi di lima universitas di tiga provinsi selatan mendirikan Jaringan Perdamaian Thailand Selatan yang dikenal dengan *the Southern*

---

<sup>9</sup>. Patcharawat Thnaprongsing, *Solving the Conflict in Southern Thailand*, USAWC Strategy Research Project, 2009, hlm. 5-7, online available at <http://www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA501215>

<sup>10</sup>. Kumpee Thongpoon, *Peace Education in the Universities of Southern Thailand*, (Faculty of Political Science, Hatyai University, Songkhla, November 2013), hlm. 5.

<sup>11</sup>. Kumpee Thongpoon, *Peace Education in the Universities of Southern Thailand*, hlm. 5.

*Thailand Peace Network* (STPN).<sup>12</sup> STPN bertujuan untuk menanamkan pandangan tentang perdamaian melalui kerjasama antar universitas melalui kegiatan pengembangan kurikulum, penelitian, pembangunan kapasitas sumber daya manusia berperspektif resolusi konflik dan perdamaian, serta kegiatan advokasi perdamaian. Satu di antara anggota STPN adalah Prince of Songkhla University (PSU) kampus Pattani, Perguruan tinggi Islam ternama –Yala Islamic University (YIU) yang saat ini lebih dikenal dengan Fatoni University (FTU, sebagai peserta aktif STPN disinyalir juga menerapkan kurikulum manajemen perdamaian dan konflik yang menggabungkan antara perspektif Barat dan Islam.<sup>13</sup> Seperti disampaikan Syukree Langputeh, materi ini wajib dipelajari oleh semua mahasiswa. FTU juga melakukan kerja sama dengan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dan *United States Institute of Peace* (UNIP) untuk mempromosikan teknik perdamaian, rekonsiliasi dan teori perdamaian dalam hubungan lintas-pendidikan.<sup>14</sup> Pertanyaan lebih lanjut tentang hal di atas adalah seberapa efektifkah program tersebut, dan bagaimana pengaruh serta kontribusinya dalam mentransformasi konflik. Sementara di sisi lain, pendidikan termasuk pendidikan agama memiliki potensi besar untuk memupuk prinsip-prinsip kekerasan, fanatisme kelompok dan golongan, serta keinginan membalas dendam terhadap perlakuan salah yang diterima di masa lampau. Karena itu kurikulum, pendekatan, metode, dan strategi implementasi pendidikan dan pengajaran harus dipastikan tidak memupuk dan melanggengkan konflik dan kekerasan tetapi sebaliknya: menginternalisasi nilai-nilai, sikap dan kompetensi cinta damai. Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yang dimaksudkan untuk mengkaji lebih jauh tentang kekuatan potensi lembaga pendidikan dalam mentransformasi konflik melalui pendidikan perdamaian di Thailand Selatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh beberapa permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana efektifitas program Pendidikan Perdamaian pada *Rotary Peace Centre* di Universitas Chulalongkorn serta kekuatan potensinya dalam mentransformasi konflik?
2. Bagaimana eksistensi pendidikan perdamaian dalam kurikulum serta implementasinya pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi (universitas) di Thailand Selatan, khususnya di FTU dan College Islamic Studies (CIS) PSU

---

<sup>12</sup>. Lima Universitas anggota Jaringan Perdamaian Thailand Selatan (STPN) adalah Prince of Songkla University (Pattani), Prince of Songkla University (Hat Yai), Thaksin University (Songkla), Hat Yai University (Hat Yai), and Yala Islamic College (Pattani) yang sekarang berubah nama menjadi Fatoni University.

<sup>13</sup>. Idenya adalah untuk membuktikan bahwa Islam kompatibel dengan modernitas tanpa kehilangan moralitas, yang menjadi sumber utama ketegangan antara umat Buddha dan Muslim. Interview dengan Shukree Langputeh, wakil rector bidang kerjasama Fatoni University, 19 Agustus 2016.

<sup>14</sup>. Interview dengan Shukree Langputeh, Wakil Rector Bidang Kerjasama Fatoni University, 19 Agustus 2016.

3. Bagaimana efektivitas implementasi pendidikan perdamaian pada lembaga pendidikan tinggi tersebut (FTU dan CIS PSU) dan kekuatan potensinya dalam mentransformasi konflik melalui pendidikan perdamaian di Thailand Selatan ?

### C. Tujuan Penelitian

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui efektivitas program Pendidikan Perdamaian pada *Rotary Peace Centre* di Universitas Chulalongkorn serta kekuatan potensinya dalam mentransformasi konflik.
2. Untuk mengetahui eksistensi pendidikan perdamaian dalam kurikulum serta implementasinya pada lembaga pendidikan tinggi (universitas) di Thailand Selatan, khususnya di FTU dan College Islamic Studies (CIS) PSU
3. Untuk mengetahui efektivitas implementasi pendidikan perdamaian pada FTU dan CIS PSU dan kekuatan potensinya dalam mentransformasi konflik melalui pendidikan perdamaian di Thailand Selatan.

### D. Kegunaan Penelitian

Gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan penelitian ini diharapkan menjadi informasi baru yang penting dan berguna dalam rangka melihat alternatif solusi terhadap konflik intra-nasional yang berkepanjangan di Thailand. Selain itu, juga diharapkan memberikan gambaran yang jelas terutama bagi kaum terdidik seperti akademisi, para sarjana, pendidik dan tokoh agama terkait kekuatan potensi lembaga pendidikan dalam transformasi konflik melalui pendidikan perdamaian, serta dapat menentukan pendekatan, metode, dan strategi implementasi pendidikan perdamaian yang efektif dalam mempersiapkan anak dan generasi muda yang lebih cinta damai dan menyebarkan kedamaian sehingga terjalin hubungan yang damai antar berbagai pihak di Thailand. Uraian tentang pengalaman akademisi, para sarjana, dan pendidik dalam upaya resolusi konflik melalui pendidikan perdamaian di Thailand Selatan juga diharapkan dapat mengilhami dan menginspirasi kaum Muslim di belahan bumi lainnya –khususnya Indonesia– yang juga memiliki potensi konflik cukup tinggi karena heterogenitas suku, ras, bahasa, agama dan budaya. Penelitian ini juga diharapkan bermakna dalam rangka mewujudkan misi perdamaian global dan pengembangan budaya damai, serta penguatan kesadaran *multicultural* sebagai perwujudan dari Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Secara akademis, hasil penelitian ini pada gilirannya sangat berguna untuk pembaharuan bahan ajar mata kuliah Studi Islam Asia Tenggara (SIAT) yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa UIN Suska. SIAT secara keilmuan tergolong relatif baru dan masih sangat terbuka untuk menjadi subjek penelitian dan pengembangan, selain itu SIAT juga menjadi distingsi serta *excellence* yang membedakan UIN Suska dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) lainnya, sesuai dengan keberadaan UIN Suska sebagai pusat Studi Islam Asia Tenggara.

## KERANGKA TEORI

## A. Transformasi Konflik Melalui Pendidikan Perdamaian

Konflik yang melanda beberapa negara adalah cerminan adanya gesekan sebagai implikasi perbedaan pendapat dan nilai-nilai yang diyakini oleh pihak-pihak yang bersengketa.

“Aktor-aktor ini dapat berupa negara dengan negara atau negara dengan beberapa kelompok yang menginginkan pemikirannya untuk didengar dan diprioritaskan. Perbedaan nilai yang dianut menumbuhkan prasangka terhadap yang lain. Prasangka kemudian dikonkritkan dalam perilaku dan atau tindakan diskriminasi. Dengan demikian konflik yang terjadi dalam hubungan antar manusia dipicu oleh emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau stereotipe, salah komunikasi dan tingkah laku negatif yang berulang”.<sup>15</sup>

Karena konflik berasal dari pikiran manusia, karena itu usaha transformasi konflik harus dimulai dari hati, pikiran dan jiwanya. Sebagaimana ditegaskan Oglala Sioux, "There can never be peace between nations until it is first known that true peace is within the souls of men".

Selain itu, meskipun terdapat beberapa konflik yang dapat diakhiri, namun seringkali penyelesaian konflik tersebut masih menghasilkan *negative peace*.

“*Negative peace* adalah suatu keadaan dimana perdamaian belum benar-benar tercapai karena masih terdapat beberapa potensi konflik yang dapat timbul dan dapat memunculkan konflik baru yang memiliki dampak yang cenderung lebih besar dan berkepanjangan dibandingkan dengan konflik yang sebelumnya. Oleh karena itu, perlu adanya serangkaian transformasi konflik untuk merubah *negative peace* menjadi *positive peace*”.<sup>16</sup>

Transformasi konflik dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang damai. “Kedamaian” bermakna bukan hanya absennya kekerasan struktural (*negative peace*), tetapi juga terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial (*positive peace*). “Perdamaian” merupakan pencapaian kualitas kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi tata nilai (*value system*) yang berlaku umum dalam masyarakat. Perdamaian dalam konsep ini meliputi semua aspek tentang masyarakat yang baik, seperti: terpenuhinya hak asasi yang bersifat universal, stabilitas sosial-politik, supremasi hukum, kesejahteraan ekonomi, keseimbangan ekologi dan nilai-nilai pokok lainnya.

Konflik berkepanjangan antara Thai Buddha dan Muslim Melayu di Thailand Selatan bertahan sebagian besar, karena adanya stereotip terhadap 'yang lain,' diambil dari perspektif agama dan budaya dari kedua kelompok, serta terbatasnya pengetahuan tentang 'the others' yang tertanam dalam masyarakat. Stereotip dan prasangka seperti dua elemen penting yang berkontribusi terhadap kedegilan situasi

---

<sup>15</sup>. Stephen Baron, John Field, and Sculler eds, *Social Capital: Critical Perspectives*, (New York: Oxford University Press Inc, 2000); Gary T Furlong, *The Conflict Resolution Toolbox: Models & Maps for Analyzing, Diagnosing, and Resolving Conflict*. (Ontario: John Wiley & Sons Canada, Ltd, 2005).

<sup>16</sup>. Nur Efendi, “Zakat dan *Peace Building*: Suara untuk Aleppo Suriah”, *Republika*, Kamis, 05 May 2016.

dan memblokir transformasi. Identitas agama dan budaya secara fundamental terjalin erat dalam konflik Thailand. Di sinilah letak urgensi internalisasi nilai-nilai cinta damai melalui pendidikan yang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan internalisasi nilai-nilai yang mengarah pada terciptanya budaya damai (*culture of peace*).

“Pendidikan berperan sebagai sebuah proses *social engineering* untuk melakukan penetrasi secara halus (*penetration of pacifique*) tentang pandangan dunia, nilai dan gagasan kepada peserta didik, sehingga mendorong terjadinya proses transformasi pada ranah pemikiran, kesadaran, sikap dan perilaku”.<sup>17</sup> Terutama pendidikan dalam artian “proses pembelajaran yang diselenggarakan secara sadar dan terencana”. “Karena melalui proses pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik, upaya mengembangkan potensi konstruktif, akan dapat tercapai. Maka tidak berlebihan jika ada yang berpandangan bahwa, masa depan sebuah bangsa ditentukan oleh bagaimana bangsa tersebut mengembangkan sistem pendidikannya. *Mafhum mukhalafah*-nya, bangsa yang mengelola sistem pendidikannya dengan serampangan, maka besar kemungkinannya bangsa tersebut akan terbelit dengan persoalan kemanusiaan”.

## B. Transformasi Konflik

Konsep ‘transformasi konflik’ digagas dan dipopulerkan oleh John Paul Lederach.<sup>18</sup> Term transformasi konflik digunakan Lederach sejak tahun 1980’an, pasca mengalami konflik yang intens selama tinggal di Amerika Tengah. Pemikiran Konsep ini dilatarbelakangi oleh kegelisahannya terhadap ketidak mampuan konsep-konsep sebelumnya dalam menjawab secara paradigmatis persoalan penyelesaian konflik. Konsep resolusi konflik, misalnya, menurutnya menyebabkan kecemasan tertentu karena menimbulkan bahaya kooptasi yang ditimbulkannya yaitu berimplikasi pada makna konflik yang kaku dimana ia akan dijadikan orang tertentu sebagai isu legitimasi dan kepentingan. Menurut Lederach, ini sangat tidak jelas mengingat resolusi konflik menjadi tak sesuai dengan advokasi. Resolusi konflik menurutnya “tidak dapat mengantisipasi perubahan yang akan terjadi sebagai akibat dari resolusi konflik tersebut”.<sup>19</sup>

Menurut pendapat Lederach:

“Hal-hal yang dapat memperpanjang konflik dan mengakibatkan kerusakan harus diubah menjadi sesuatu yang konstruktif. Maksud dari perubahan yang konstruktif adalah mengubah cara pandang terhadap konflik menjadi positif dengan melihat bahwa konflik bermanfaat bagi suatu hubungan. Proses perubahan yang konstruktif inilah yang disebut dengan transformasi konflik”.

---

<sup>17</sup>. I Ketut Sudarsana, “Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia”, *Jurnal Penjaminan Mutu*, vol.1, no. 1. 2015.

<sup>18</sup>. John Paul Lederach adalah Profesor bidang *International Peacebuilding* di Universitas Notre Dame, Indiana. Pada saat yang sama ia juga dosen tamu di Eastern Mennonite University. Ia banyak menulis tentang resolusi konflik dan mediasi.

<sup>19</sup>. John Paul Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation; Clear Articulation of the Guiding Principles By a Pioneer in The Field*, (New York: Skyhorse Publishing, 2003



Dalam bukunya yang berjudul “*Conflict Transformation*”, lebih jelasnya Lederach memberikan definisi transformasi konflik sebagai berikut:

“*Conflict transformation is to envision and respond to the ebb and flow of social conflict as life-giving opportunities for creating constructive change processes that reduce violence, increase justice in direct interaction and social structures, and respond to real-life problems in human relationships*”.<sup>20</sup>

Ini menjelaskan bahwa konflik dapat digunakan sebagai kesempatan untuk terjadinya proses perubahan secara menyeluruh dan membangun (konstruktif). Perubahan yang terjadi pertama harus menghilangkan kekerasan. Kedua, membawa nilai keadilan dalam interaksi langsung di antara masyarakat, khususnya mereka yang berkonflik. Ketiga, menggunakan konflik untuk membangun karakter yang lebih toleran. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa melalui transformasi konflik diharapkan terjadi “proses perubahan dimana kekerasan dihindarkan dan semua pihak saling membangun.” Transformasi konflik –menurut Lederach– lebih dari hanya tehnik-tehnik yang bersifat spesifik. Menurutnya:

“Transformasi konflik adalah suatu cara untuk melihat konflik secara utuh. Dalam pendekatan resolusi konflik menurutnya terkadang para peneliti lebih cenderung untuk melihat secara detail terfokus kepada kasus-kasus yang terjadi sehingga menghalangi pemikiran melihat konteks konflik secara utuh. Untuk itu diperlukan suatu cara pandang yang berbeda. Yang dimaksudkan oleh Lederach dengan melihat konflik secara utuh adalah dengan melihat konflik tidak hanya kasus-kasus konflik yang terjadi dipermukaan tetapi juga akar-akar konflik yang menjadi pola yang berkelanjutan, dimana jika tidak diselesaikan konflik akan terjadi kembali”.<sup>21</sup>

Pandangan Lederach tentang perubahan dan konflik menarik untuk dicermati.

“Konflik adalah sesuatu yang normal dan selalu ada dalam relasi sosial manusia. Terkait hal itu, relasi sosial tidaklah statik, tetapi selalu dinamik dan adaptif. Dengan demikian konflik akan memberikan dampak situasi kondisi dan dapat merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain dalam berbagai bentuk dan dalam cara yang berbeda. Perubahan adalah juga suatu proyeksi kondisi yang kita inginkan ke depan. Dalam pemahaman perubahan, transformasi konflik bukanlah alat analisa yang hanya menganalisa perubahan yang telah dan sedang terjadi akibat konflik namun ia menyediakan suatu kerangka perubahan yang kita inginkan ke depan”.<sup>22</sup>

Analisis perubahan tersebut menurut Lederach dapat dilakukan dalam 4 dimensi level beserta proyeksi perubahan melalui transformasi konflik pada masing-masing dimensi tersebut sebagaimana berikut :

1. Personal: pada dimensi ini seseorang mengalami perubahan pada aspek kognitif, persepsi, emosi, spiritual, mental dan perilaku akibat konflik. Transformasi

---

<sup>20</sup>. John Paul Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation; Clear Articulation of the Guiding Principles By a Pioneer in The Field*, (New York: Skyhorse Publishing, 2003), hlm. 14

<sup>21</sup>. *Ibid.*

<sup>22</sup>. John Paul Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation*, hlm.14

konflik diperlukan agar seseorang terbebas dari dampak destruktif konflik baik secara intelektual, mental maupun spiritual. Sebaliknya transformasi membuat perkembangan potensi pada tingkat individu menjadi lebih maksimal; baik secara intelektual, spiritual, emosional, maupun fisik.

2. Relasional. Pada tataran ini, konflik berpengaruh pada relasi sosial dimana di dalamnya ada hubungan antar unsur kekuasaan dan ketergantungan. Transformasi dibutuhkan untuk memulihkan pola komunikasi dan interaksi dalam sebuah relasi yang berkonflik dengan berupaya memperbaiki alur komunikasi antar personal maupun kelompok yang sebelumnya tak terjalin dengan baik.
3. Struktural. “Dimensi ini terkait dengan struktur sosial atau aturan-aturan yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat”. Transformasi konflik berupaya memahami akar konflik yang berkaitan erat dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi ; mempromosikan mekanisme penyelesaian konflik yang mempengaruhi kondisi sosial dengan berprinsip *non-violence* (anti kekerasan).
4. Kultural (budaya). Pada level ini konflik dipandang mempengaruhi nilai-nilai budaya masyarakat. Transformasi konflik pada tahap ini berarti “mengidentifikasi dan memahami pola budaya dalam masyarakat yang dapat memicu kekerasan sebagai ekspresi dari konflik; selain itu juga mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang dapat menangani konflik secara konstruktif”; “mengenali dan mengembangkan sumber daya dan mekanisme *peacebuilding* dalam menyelesaikan permasalahan konflik yang ada dimana di dalamnya merupakan sebuah dasar budaya untuk merespon dan menangani konflik secara konstruktif”. Empat dimensi dalam pendekatan transformasi di atas saling berhubungan satu dengan yang lainnya.<sup>23</sup>

### C. Pendidikan Perdamaian & Transformasi Konflik

Penelitian ini berdasarkan pada pandangan bahwa pendidikan adalah pilar utama dalam transformasi nilai dan pembentukan karakter. Nilai-nilai dan budaya damai juga dapat diinternalisasi, serta pribadi berkarakter yang berperilaku dan mencintai perdamaian dapat direalisasikan dengan proses pendidikan. Namun faktanya, pendidikan seringkali tarik menarik dengan lingkungan politik, sosial ekonomi dan agama. Kekerasan pada lingkungan-lingkungan itu akan sangat berpengaruh pula pada proses pendidikan. Pada konteks seperti itulah maka tidak mustahil pendidikan berperan sebagai penyangga budaya tindakan kekerasan. Seharusnya proses pendidikan menjadi pilar bagi syi’ar perdamaian, namun dalam konteks semacam ini ia berperan sebagai pilar syi’ar sikap kebencian. Disinilah letak urgensi internalisasi budaya damai melalui *peace education*.

Manusia secara alamiah berkembang melalui proses belajar. Tahap pertama seorang anak belajar adalah dari apa yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini keluarga

---

<sup>23</sup>. John Paul Lederach dalam Michelle Maiese, “Conflict Transformation”, online journal *Beyond Intractability*, Oktober 2003, :<http://www.beyondintractability.org/essay/transformation>, diakses pada 14 Maret 2017; John Paul Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation*,

adalah media belajar pertama. Kemudian tahap berikutnya diperoleh dari sekolah/pendidikan formal. Sehingga pendidikan untuk mendukung perdamaian dapat diberikan kepada anak-anak maupun orang dewasa baik secara formal dan informal.

Sehubungan dengan tujuan pendidikan untuk mewujudkan perdamaian, dalam literatur Barat, sudah sejak lama dikenal istilah “Pendidikan Perdamaian” (*peace education*), karena telah banyak yang mendiskusikan dan mengembangkan gagasan dan implementasinya. Pendidikan Perdamaian bahkan telah menjadi gerakan global. “Pada tahun 1999, ribuan orang yang mewakili ratusan organisasi hadir dalam acara *International Peace Conference* di The Hague, Belanda. Dalam acara tersebut dicetuskan *The Hague Appeal for Peace*, yang menyerukan penghentian segala peperangan dan penyebaran budaya perdamaian. Salah satu hasil *The Hague Appeal* adalah pembentukan *Global Peace Education Network* guna mendukung aplikasi pendidikan perdamaian di seluruh dunia”.<sup>24</sup>

Ada sejumlah definisi yang disampaikan tentang pendidikan perdamaian, diantaranya oleh *United Nations Children’s Fund* (UNICEF. Badan PBB yang mengurus pendidikan ini memaknai *peace education* sebagai

“proses mempromosikan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membawa perubahan perilaku yang memungkinkan anak, pemuda, dan orang dewasa melakukan pencegahan konflik dan kekerasan, menyelesaikan konflik dengan cara damai, dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk perdamaian baik pada level antar personal, interpersonal, antar kelompok, nasional dan internasional.”<sup>25</sup>

Pendapat lain adalah bahwa pendidikan perdamaian adalah

“Model pendidikan yang mengupayakan perberdayaan masyarakat agar mampu mengatasi konfliknya sendiri dengan cara kreatif dan tanpa kekerasan. Nilai-nilai yang termuat dalam pendidikan perdamaian adalah rasa saling menghargai, saling menghormati, saling percaya, mencintai, tenggang rasa, kerja sama, keadilan, toleransi dan integrasi”.<sup>26</sup>

Singkatnya, seperti dikemukakan Ardizzone, pendidikan perdamaian selalu peduli dengan pemahaman terhadap akar penyebab segala bentuk kekerasan dan berikutnya penyelesaian masalah tersebut.<sup>27</sup>

Sejalan dengan konsep transformasi konflik, menurut Hicks, pendidikan perdamaian mempromosikan pengembangan keterampilan berpikir kritis, serta menggabungkan belajar bagaimana bekerja sama dan menyelesaikan konflik tanpa

---

<sup>24</sup>. 'The Hague Appeal for Peace Conference' May 11-15, 1999, Report from Ann Abror Delegation, online, available at <http://www-personal.umich.edu/~lormand/agenda/9907/16.pdf>; Leonisa Ardizzone, Toward Global Understanding, the Transformative Role of Peace Education. *Journal of Current Issues in Comparative Education*, Vol. 4 (2) 2001, hm. 18-19.

<sup>25</sup>. Susan Fountain, (1999). *Peace Education in Unicef*, (Newyork: UNICEF, 1999), hlm.1.

<sup>26</sup>. Imam Machalli. Peace Education dan Deradikalisasi Agama, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume II, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 45.

<sup>27</sup> Leonisa Ardizzone . “Towards Global Understanding: The Transformative Role of Peace Education”, *Journal Current Issues in Comparative Education*, Columbia University, Vol. 4(2), 2001. hlm. 16.

kekerasan, berfungsi mendorong pengembangan kesadaran yang memungkinkan kita untuk berfungsi sebagai warga global dan untuk mengubah kondisi manusia saat ini dengan mengubah struktur sosial.<sup>28</sup> Konsep Reardon tentang pendidikan perdamaian juga relatif sama dengan Hicks yang menurutnya berfungsi untuk mentransmisikan berbagai pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menafsirkan ide-ide serta pengembangan kapasitas reflektif dan partisipatif untuk menerapkan pengetahuan dalam rangka mengatasi konflik.<sup>29</sup>

Lebih jauh, gagasan Reardon tentang memelihara kapasitas reflektif dan partisipatif sama dengan konsep Paulo Freire tentang "penyadaran", sebuah ide yang menginformasikan tentang pendidikan perdamaian melalui penekanan pada peningkatan kesadaran kritis peserta didik sebagai sarana untuk perubahan sosial. Freire, dalam mengembangkan pedagogi humanistik, pembebasan, dan revolusionernya, menciptakan istilah "Conscientização" untuk mendefinisikan "belajar untuk memahami kontradiksi sosial, politik dan ekonomi dan untuk mengambil tindakan terhadap unsur-unsur yang menindas realitas"<sup>30</sup>. Dengan mengembangkan analisisnya tentang sifat dan dampak penindasan, pedagogi Freire menekankan perlunya kaum tertindas untuk mengamati situasi penindasan mereka, sehingga memungkinkan proses penggalangan kesadaran untuk dimulai. Pergeseran kesadaran ini diperlukan karena mereka "selama tertindas tetap tidak menyadari penyebab kondisinya, mereka pasrah 'menerima' eksploitasinya."<sup>31</sup> Tentu saja, karena sangat sedikit kesempatan berada di tempat baik di dalam negeri dan internasional yang memungkinkan kaum tertindas untuk melihat sifat sejati dari keberadaan mereka, banyak yang merasa tidak berdaya untuk mengubah situasi mereka, menerima kesulitan sehari-hari dan kekerasan yang mengelilingi mereka. Namun, Freire menekankan bahwa realitas penindasan tidak harus dianggap sebagai permanen melainkan sebagai sistem yang membatasi tapi akhirnya dapat ditransformasi. Pengakuan Freire bahwa masyarakat adalah dinamis, bukan statis tidak hanya membuat pedagoginya benar-benar membebaskan dan transformasional, tetapi juga menyediakan dukungan lebih lanjut untuk praktek pendidikan perdamaian di era globalisasi.

Teori pendidikan perdamaian, seperti Magnus Haavelsrud<sup>32</sup> telah menegaskan hal ini dan gagasan Freirean lainnya mengenai perlunya pendidikan untuk mengembangkan kesadaran dan pemahaman tentang hubungan sebab-akibat, sehingga memperluas cakrawala. Dengan memahami mikro / hubungan makro (atau populer disebut lokal / global), peserta didik dapat memahami kontradiksi dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Melalui persepsi awal ini, dan pemahaman berikutnya, peserta didik menjalani transformasi yang mendalam ditandai dengan diperluasnya pandangan dunia dan pemahaman yang lebih dalam tentang keterkaitan semua makhluk di planet ini.

---

<sup>28</sup> David Hicks (Ed.), *Education for peace, Issues, Principles and Practices in the Classroom*.

<sup>29</sup> . Betty A. Reardon, *Peace Education: A review and projection*.

<sup>30</sup> . Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Seabury Press, hlm. 17.

<sup>31</sup> . Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Seabury Press, hlm. 51.

<sup>32</sup> . Magnus Haavelsrud, *Education in developments*, (Arena: Norway, 1996).

Gavriel Salomon mengelompokkan pendidikan perdamaian menjadi tiga yang disesuaikan dengan konteks dimana pendidikan perdamaian diselenggarakan:

“Pertama, pendidikan perdamaian dalam wilayah yang keras atau wilayah konflik (*Peace Education in intractable regions or areas of intractable conflict*). Kedua, pendidikan perdamaian pada wilayah di mana terdapat ketegangan antar entik (*Peace Education in regions of inter-ethnic tension*); Ketiga, pendidikan di wilayah yang tenang (*Peace Education in regions of experienced tranquility*)”.<sup>33</sup>

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pendidikan perdamaian adalah term yang digunakan bagi program pendidikan yang dirancang untuk mentransformasi pemikiran aktor-aktor yang sedang bertikai, agar satu sama lain bisa saling menerima. Mengingat pertikaian berawal dari pemikiran manusia, karena itu dari sanalah mesti dimulai orientasi perdamaian. Untuk merubah kognisi, sikap, mental, dan perilaku sebagaimana menjadi fokus pendidikan perdamaian, diperlukan *design* (perencanaan), metode dan strategi yang tepat sehingga terselenggara pendidikan perdamaian yang relevan dengan konteks sosial masyarakatnya.

Lebih jauh, ada empat komponen saling terkait yang tercakup dalam design pembelajaran pendidikan perdamaian, yaitu, tujuan, materi, metode dan evaluasi.<sup>34</sup> Materi *peace education* harus berkaitan dengan tujuan pendidikan perdamaian, dimana tujuannya merubah aspek kognitif, afeksi disposisional, dan perilaku. Materi pendidikan perdamaian dalam kasus konflik antar etnis misalnya harus diarahkan untuk merubah sikap dan rasa anti etnis melalui bahan ajar multikulturalisme dan anti rasisme.<sup>35</sup> Selain itu, kemampuan berkomunikasi, mendengarkan, memahami pandangan yang berbeda, kerjasama, berpikir kritis, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan memecahkan konflik, tanggungjawab sosial, dan solidaritas lintas kultur perlu dilatih dan dibiasakan dalam proses pembelajaran pendidikan perdamaian. Dalam proses pembelajaran, pendekatan dan metodenya mesti yang memungkinkan untuk memulihkan hubungan antar-personal, menyembuhkan trauma dan mempromosikan koeksistensi sosial. Sementara itu, evaluasi diarahkan untuk memastikan ketercapaian tujuan dan maksud pendidikan perdamaian sebagaimana dijelaskan di atas.

#### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang dilakukan terkait pokok bahasan ini. Satu diantaranya adalah oleh Daniel Bar-Tal, berjudul "*The Elusive Nature of Peace Education*". Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan perdamaian tidak berfungsi sebagai indoktrinasi, melainkan muncul sesuai kebutuhan dan keinginan penduduk negara setempat. Karena itu, hasil survei tentang pelaksanaan pendidikan perdamaian di beberapa negara, menunjukkan perbedaan satu sama lain baik dalam tataran

---

<sup>33</sup> Alberto Valiente Thoresen, *Theorizing Peace Education: A Theoretical Survey of the Practice of Peace Education*, Thesis Leading to A Master's Degree in Peace and Conflict Transformation, University of Tromso, 2005, hlm. 68.

<sup>34</sup> Hisyam Zaini, dkk. (2005). *Desian Pembelajaran di Perguruan Tinggi*, CTSD, Yogyakarta.

<sup>35</sup> Alberto Valiente Thoresen, *Theorizing Peace Education: A Theoretical Survey of the Practice of Peace Education*, Thesis, University of Tromso, 2005, hlm. 68.

format, tujuan, isi maupun kurikulumnya yang disesuaikan dengan konteks ideologi masing-masing negara.<sup>36</sup> Balkan misalnya lebih memfokuskan pendidikan perdamaianya pada resolusi konflik dan pendidikan demokrasi,<sup>37</sup> di Siprus dan Irlandia Utara pendidikan perdamaian lebih diorientasikan pada pemahaman antarbudaya,<sup>38</sup> proyek-proyek Asia menangani perlucutan senjata dan pendidikan anti-nuklir<sup>39</sup>, sementara di Amerika Latin inisiatif pendidikan perdamaianya lebih terkait dengan pendidikan populer.<sup>40</sup>

Penelitian lainnya adalah tentang *Story-Telling as a Means for Peace Education: Intercultural Dialogue in Southern Thailand*,<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, konsepsi *Storytelling* dipandang memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian melalui pendidikan. Karena itu *Storytelling* dimanfaatkan sebagai media untuk pembelajaran transformatif yang memupuk kesadaran kolektif. Tujuan dari program ini adalah untuk mempromosikan dialog antarbudaya dan meningkatkan kesadaran akan 'yang lain.' Hal ini mendorong orang untuk mempraktekkan nilai-nilai budaya damai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai penangkal budaya kekerasan. Praktek pendidikan perdamaian melalui cerita (*story-telling*) terbukti dapat membuat 'ruang' untuk dialog reflektif di mana hubungan antar-pribadi dapat dipulihkan, dan koeksistensi sosial dipromosikan. Melalui penggunaan cerita, peserta dapat diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman hidup, menegaskan satu sama lain, dan internalisasi nilai-nilai baru untuk menciptakan budaya damai.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Kevin Kesler, *Developing Peace Education Programs Beyond Ethnocentrism & Violence*. Penelitian Kesler bersifat pengembangan pendidikan perdamaian menanggapi penelitian yang dilakukan tentang etnosentrisme, ras dan gender dalam ruang kelas dalam dua konteks yang dipandang homogen di Kentucky dan Jepang dimana terdapat diskriminasi gender dan fanatik

---

<sup>36</sup>. Daniel Bar-Tal, The elusive nature of peace education. January, 2002. *Online Journal*, Available at: <http://www.tau.ac.il/~daniel/pdf/39.pdf> ; Petroska-Beska, V. (2000). Peace education as a framework for changes in the overall education system. Online.

<sup>37</sup>. D. Corkalo, (2000). *Challenges for peace education in new democracies: The case of Croatia*. [Online]. Available at: <http://construct.haifa.ac.il/~cerpe/papers/corkalo.html>; Murdzeva-Skarik, O. (2000). University peace workers have a challenging anxiety in the Balkans. *Peacebuilding*, 2(4), 5-7.

<sup>38</sup>. Duffy, T. (2000). "Fragile steps": *Forging a culture of peace in Northern Ireland*. [Online]. Available at: <http://construct.haifa.ac.il/~cerpe/papers/duffy.html> ; Hadjipavlou-Trigeorgis, M. (2000). A partnership between peace education and conflict resolution: The case of Cyprus. [Online]. Available at: <http://construct.haifa.ac.il/~cerpe/papers/mariaht.html>.

<sup>39</sup> Yamane, K. (1996). A peace museum as a center for peace education: What do Japanese students think of peace museums? dalam R. Burns & R. Aspeslagh (Eds.), *Three decades of peace education around the world: An anthology*. New York: Garland; Floresca-Cawagas, V & Toh, S. (1993). From the mountains to the seas: Education for a peaceful Philippines dalam M. Haavelsrud (Ed.), *Disarming: Discourse on violence and peace*. Norway: Arena.

<sup>40</sup>. Diaz, J. (1993). Peace education in a culture of violence. In M. Haavelsrud (Ed.), *Disarming: Discourse on violence and peace*. Norway: Arena; Cabezudo, A. (1993). Peace and Disarmament Education in Latin America. In M. Haavelsrud (Ed.), *Disarming: Discourse on violence and peace*. Norway: Arena.

<sup>41</sup>. Erna Aanjarwati & Allison Trimble, " Story-Telling as a Means for Peace Education: Intercultural Dialogue in Southern Thailand" *Journal of Living Together, ICERM*.

ras, dan tidak ada kebijakan sekolah atau tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghapuskan diskriminasi tersebut. Penelitian Kesler, ia maksudkan untuk menjelaskan model pendidikan perdamaian yang dipandang tepat untuk konteks tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif mengingat permasalahan yang diteliti sangat kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial yang kompleks, dinamis dan belum jelas problemnya tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif. Selain itu penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memahami pokok permasalahan secara mendalam. Sedangkan metode *grounded theory* adalah teori yang diperoleh secara induktif dari penelitian dari fenomena yang dijelaskannya. Metode ini digunakan karena bukan untuk menguji teori atau memulai penyelidikan dengan pegangan pada suatu teori tertentu lalu membuktikannya, melainkan dengan pegangan pada suatu bidang kajian *peace education* dan transformasi konflik serta hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Thailand, tepatnya di Prince of Songkhla University (PSU), Fatani University (FTU) dan Chulalongkorn University

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

1. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai obyek yang diamati.
2. Wawancara Mendalam (*in depth interview*) merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/ obyek penelitian untuk mendapatkan data-data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pertanyaan yang diajukan kepada obyek penelitian dipandu dengan *interview guide* dan pertanyaan tersebut bisa berkembang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan kedalaman data yang ingin diperoleh.

3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.

#### **D. Jenis Data dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara langsung dengan informan dan dokumentasi berupa regulasi, kebijakan, buku pedoman, serta sumber-sumber tertulis lainnya. Sedangkan data sekunder adalah yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Pusat Biro Statistik, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

#### **G. Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak bisa hanya dilakukan secara linear, tetapi harus menggunakan analisis interaktif (*interactive analysis*). Dalam metode ini, model ini disebut juga dengan model interaktif secara siklus (*syclycal interactive analysis model*). Komponen dari analisis tersebut adalah reduksi data, sajian data, penarikan simpulan. Seluruh data yang terhimpun itu dikaji, dianalisis dianalisis secara kritis melalui pertimbangan perspektif historis dan kontekstual terhadap objek penelitian, untuk kemudian diartikulasikan dalam konstruksi pembahasan yang sistematis, logis dan komprehensif.

### **IMPLEMENTASI PENDIDIKAN PERDAMAIANDALAM RANGKA TRANSFORMASI KONFLIK**

Ada beberapa data disertai analisisnya yang disajikan dalam bab ini. *Pertama* Latar Belakang Konflik. *Kedua*, Penyebab konflik. *Ketiga*, terkait efektifitas program Pendidikan Perdamaian pada *Rotary Peacedi* Universitas Chulalongkorn serta kekuatan potensinya dalam mentransformasi konflik. *Keempat*, eksistensi pendidikan perdamaian dalam kurikulum serta implementasinya pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi (Universitas) di Thailand Selatan. *Kelima*, efektivitas implementasi pendidikan perdamaian pada lembaga pendidikan tinggi tersebut serta kekuatan potensinya dalam mentransformasi konflik melalui pendidikan perdamaian di Thailand Selatan.

#### **A. Konflik Thailand Selatan**

Thailand adalah negara berpenduduk mayoritas etnis Thai yang menganut agama Budha. Jumlah mereka mencapai sekitar 94% dari seluruh jumlah penduduk. Sementara itu, Muslim di Thailand berjumlah sekitar 5.8%, karena itu mereka adalah



minoritas.<sup>42</sup> Menurut Don Pathan, Direktur Hubungan Luar Negeri Forum Patani–Minoritas Muslim Melayu, secara geografis terkonsentrasi di tiga provinsi paling Selatan, tepatnya di Provinsi Pattani, Yala, Narathiwat dan 4 (empat) kabupaten di Provinsi Songkhla. Total populasi di Thailand Selatan berjumlah sekitar 2 juta orang, di antaranya lebih dari 1,5 juta adalah Melayu Muslim.<sup>43</sup> Muslim Melayu mencapai 80% dari seluruh jumlah penduduk Thailand Selatan.<sup>44</sup>

Melayu Muslim Thailand tidak hanya berbeda secara letak geografis dengan warga Thailand lainnya, tetapi juga berbeda dalam hal agama dan budaya. Sebagian besar Muslim di Thailand Selatan memiliki karakteristik yang sama dengan Muslim di Malaysia. Kondisi ini menyebabkan kehidupan sosial Melayu Muslim Thailand Selatan tidak sama dengan warga di wilayah lain, baik budaya, bahasa, maupun agama.

Songkhla merupakan provinsi terbesar di Thailand Selatan, berperan sebagai pusat dagang di Selatan dan mempunyai bandara internasional. Mayoritas Thai Budhis tinggal di wilayah kota. Di Selatan, mereka tergolong kelas ekonomi menengah meskipun tergolong minoritas, dan banyak yang bekerja sebagai pengusaha dan pegawai pemerintah.

Kesadaran historis juga melekat secara kuat dalam alam sadar Melayu. Mereka menyadari bahwa wilayah Thailand Selatan yang mencakup provinsi Pattani, Narathiwat, Yala, dan Songkhla dulunya adalah bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Patani. Sejak 1906, sesuai dengan perjanjian (*Anglo-Siam Treatment*), Inggris dan Siam menguasai negeri-negeri di Melayu Utara. Pattani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkhla oleh Siam dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan negara Thailand. Sementara Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu dijadikan oleh Inggris menjadi bagian wilayah kekuasaan Malaysia.

Kerajaan Patani semula adalah Kesultanan Melayu berdaulat yang penduduknya mayoritas Melayu Muslim. Kesultanan tersebut dikenal orang sebagai kesultanan penting dalam penyebaran agama Islam. Karena statusnya sebagai satu-satunya wilayah pelabuhan, ia menjadi centra perdagangan yang berpengaruh kuat di perairan Laut Cina Selatan. Ini menyebabkannya pada masa itu menjadi simbol kejayaan Melayu. Selain itu, kesultanan ini juga kaya dengan sumber daya alam seperti emas, timah, lada, sutra, kapur barus, gaharu dan emboni. Banyak warga asing yang datang berkunjung dan melakukan hubungan dagang dengan Pattani. Karena kekayaan sumber daya alam dan kuatnya pengaruh dalam perdagangan, Patani menjadi kerajaan yang keberadaannya diperhitungkan.

Kerajaan Patani yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, wilayah yang sangat strategis dan mempunyai pelabuhan penting terhubung ke perairan Laut Cina Selatan, serta sudah lama diincar oleh Kerajaan Siam (sekarang menjadi Thailand)

---

<sup>42</sup>. *Muslim Population by Country: How Big will each Muslim Population be by 2030*, theguardian.com; *Islam by Country*, en.m.wikipedia.org, diakses tanggal 6 April 2016.

<sup>43</sup>. Don Pathan, *Conflict Management and Resolution in Asia: The Role of Civil Societies in Thailand's Deep South*, (The Asia Foundation, Occasional paper, 18 Oktober 2012), hlm. 1

<sup>44</sup>. Mc Carrigo: 2010), hm. 1

yang bermaksud mengekspansi wilayahnya dan berkuasa atas Patani.<sup>45</sup> Kerajaan Siam bekerjasama dengan Inggris sukses menaklukkan Kesultanan Patani. Serah terima wilayah Kerajaan Patani ke Siam dilakukan Inggris di Bangkok pada tahun 1909 dan terkenal dengan “*Anglo-Siam Treatment*”.<sup>46</sup>

Perjanjian tersebut menegaskan berakhirnya kekuasaan Kesultanan Pattani serta wilayah kekuasaannya sah berada di bawah kekuasaan Siam. “Wilayah Kerajaan Patani tersebut adalah Patani, Teluban (sekarang Narathiwat), Jalor (sekarang Yala), dan sebagian wilayah Senggora (sekarang dikenal dengan nama Songkhla). Dikuasainya wilayah Kerajaan Pattani oleh Kerajaan Siam mengakibatkan penduduk yang berada di wilayah tersebut harus tunduk terhadap segala peraturan yang diberlakukan Kerajaan Siam dan identitas mereka sebagai warga Kerajaan Patani resmi berganti menjadi warga Kerajaan Siam atau sekarang dikenal sebagai Thailand”.

Perjanjian yang ditandatangani oleh Siam dan Inggris menciptakan ketidakpuasan di kalangan umat Islam di Selatan. Perjanjian *Anglo Siam Treatment* bagi Muslim Melayu adalah masalah. Mereka mesti mengadaptasikan diri dengan aturan-aturan dan situasi baru. Kehidupan di Kerajaan Thailand dengan etnis Thai yang mayoritas berbeda sekali dengan di Kesultanan Patani, baik terkait cara hidup, keyakinan agama, bahasa komunikasi, dan sebagainya. Karena itu, alih-alih bergabung menjadi minoritas Muslim di Kerajaan Siam, mereka lebih cenderung memilih bergabung menjadi warga negara tetangganya yang mayoritas Muslim. Posisi mereka sebagai warga baru di Kerajaan Siam menimbulkan banyak permasalahan baru, seperti anggapan mereka bahwa pemerintahan Siam cenderung menyudutkan bahkan sampai tidak bersedia mengakui kekuasaan Thailand terhadap wilayah Kesultanan Patani, sampai ke masalah ketertinggalan warga setempat di bidangekonomi, pendidikan, dan masalah-masalah sosial-politik. Isu-isu makin meluas dan menyebabkan aksi protes yang berimplikasi pada lahirnya gerakan etnonasionalisme Melayu dan bahkan tindakan kekerasan.

Dengan demikian, secara historis, asal-usul konflik di Thailand Selatan dapat ditelusuri dari kebijakan kolonial Inggris yang membenarkan dan mendukung pemisahan suku Melayu (yang dulu berada di dalam wilayah kesultanan Patani) menjadi dua. Satu komunitas bergabung dengan Kerajaan Siam (Thailand) dan yang lainnya disatukan ke negara Malaysia.

Ketegangan antara Muslim di Thailand Selatan dan pemerintah pusat di Bangkok terus terjadi dan intensif setelah negara berusaha memodernisasi diri, dimanasejak pergantian abad ke-20, pemerintah Thai/Siam menerapkan nasionalisme modern dalam bingkai kerajaan konstitusional.<sup>47</sup> Pemerintah Thailand menerapkan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengasimilasi provinsi Melayu-Muslim ke dalam

---

<sup>45</sup>. Kayanee Chor Boonpunth, *An Analysis of the Role of Civil Society in Building Peace in Ethno-Religious Conflict: A Case Study of the Three Southernmost Provinces of Thailand*, Paper presented at the PSA 64<sup>th</sup> Annual International Conference, Manchester, UK, April 2014.

<sup>46</sup>. Colonel Patcharawat Thnaprarnsing, *Solving the Conflict in Southern Thailand*, (USAWC Strategy Research Project, 2009), hlm. 3

<sup>47</sup>. Surin Pitsuwan, *Islam and Malay Nationalism: A Case Study of the Malay Muslims of Southern Thailand*, terj. Hasan Basri, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 21.

tubuh geo-politik Thai yang lebih luas. Bersamaan dengan itu pemerintah memaksakan identitas dan integrasi nasional yang mencakup kesamaan identitas kultural termasuk di dalamnya bahasa dan nilai-nilai budaya Thai dan ideologi nasionalnya yang memiliki akar yang kuat dari Budhisme, dimana hal tersebut tidak jarang bertentangan dengan keyakinan agama yang dianut minoritas Muslim Thailand. Karena secara kultural, minoritas Muslim yang tinggal di Thailand Selatan baik dari segi bahasa, agama, dan budaya adalah bagian dari masyarakat Melayu Muslim, berbudaya dan berbahasa Melayu rumpun dengan Melayu Malaysia. Ini berbeda dengan mayoritas penduduk di negara Thailand yang merupakan etnis Thai, menganut agama Budha, dan berbahasa Thai.<sup>48</sup> Kebijakan Thaisasi –pemaksaan bahasa, budaya dan nilai-nilai budaya Thai– dipandang tidak adil mengingat hal itu dapat mengancam identitas Melayu dan Muslim mereka. Persoalan ini menimbulkan kerasnya benturan budaya sehingga menimbulkan perlawanan yang sangat keras. Namun demikian –seperti penilaian Davis Brown– konsep integrasi Thailand adalah langkah konsolidasi pemerintahan Thai terhadap Patani dan mewujudkan *mono ethnic character of the state* (ethnis tunggal yang menjadi ciri khas Thailand).<sup>49</sup>

Kebijakan dan upaya ini mendapat penolakan dari Melayu setempat karena mereka merasa bahwa budaya dan identitas agama mereka dipertaruhkan. Seperti juga orang Thailand, Melayu Patani sangat bangga dengan lembaga, cara hidup, dan tempat tinggal mereka di wilayah berbahasa Melayu. “Asimilasi budaya berarti proses pengadopsian suatu budaya akan budaya lain secara spesifik yang berakibat pada mudahnya nilai-nilai budaya asli. Kebijakan asimilasi ini juga mencakup hal – hal mendasar seperti nama seseorang. Etnis Muslim Melayu dihimbau untuk mengganti nama mereka menjadi nama yang sesuai dengan etnis Thai. Nama – nama yang mengandung unsur Muslim atau Melayu tidak diperkenankan penggunaannya. Bagi etnis Muslim Melayu yang tidak mengikuti aturan ini atau mempertahankan nama Melayu mereka terancam tidak akan mendapatkan promosi karir atau bahkan tidak mendapatkan pekerjaan”.

Kebijakan nasionalisasi ekstrim pemerintahan Phibulsongkhram ini menyebabkan gerakan rakyat Patani terbentuk untuk menolak kebijakan ini yang dianggap sebagai upaya negara untuk menghancurkan identitas Muslimnya. Pada akhir 1960-an, keluhan ini diterjemahkan ke dalam perlawanan bersenjata terorganisir dan pembentukan gerakan separatis yaitu, Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP) pada tahun 1959, Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada tahun 1963 dan *Patani United Liberation Organization* (PULO) pada tahun 1968. Kelompok-kelompok ini disebut kelompok separatis karena komitmen mereka pada awalnya adalah untuk mendirikan negara Islam independen. Namun, tampaknya tujuan dari kelompok pemberontak saat ini telah berubah ke tuntutan otonomi dan keadilan daripada tuntutan kemerdekaan.

---

<sup>48</sup>. W.K. Che Man, *Muslim Separatism the Moros of Southern Philipines and the Malays of Southern Thailand*, (Manila: Ateneo de Manila University Press, 1990), hlm. 43-44.

<sup>49</sup>. Davis Brown, *From Pheriperal Communities to E thnic Nation*, *Journal of Pasific Affairs* 61, 1988, hlm. 51.

Resistensi terhadap asimilasi telah mengambil berbagai bentuk dan sebagian didasarkan pada alasan etno-religius, tetapi sebagian pada narasi sejarah-budaya yang melihat klaim negara Thailand sebagai ungkapan dari okupasi dan penjajahan pada abad lalu oleh kekuatan Siam.

Selain itu, Muslim Thailand Selatan memiliki kesadaran dan klaim historis terhadap wilayah yang mereka tinggali sebagai bekas wilayah Kesultanan Islam Patani sebelum wilayah tersebut dikuasai Thailand. Ini menyebabkan mereka merasa mempunyai legalitas untuk mengakui wilayah tersebut bukan bagian dari negara Thailand. Karena itu, mereka menuntut merdeka atau menjadi daerah otonom.<sup>50</sup> Persoalan ini turut menjadi akumulasi identitas politik yang berlawanan dengan kepentingan pemerintah pusat.

Sejak saat itu, kerusuhan dan aksi kekerasan kerap terjadi yang menyebabkan kerugian materil dan tidak jarang menghilangkan nyawa orang yang tak berdosa. Separatisme bersenjata memuncak di tahun 1970 dan awal 1980-an, dan secara finansial didukung oleh beberapa pemerintah di Timur Tengah yang juga memberikan pelatihan militer, dan perlindungan untuk mendorong diaspora Patani Melayu. Pada saat itu, kelompok-kelompok seperti PULO dan BNPP telah mendirikan kantor di berbagai negara Muslim di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Semangat revolusioner ini reda di akhir 1980-an dan awal 1990-an. Kekerasan menurun secara dramatis. Ini antara lain karena pendekatan baru pemerintah yang efektif dalam mengurangi kekerasan dengan menekankan partisipasi masyarakat serta pembangunan sosial dan ekonomi dari pada strategi militer murni.<sup>51</sup> Faktor penyebab lainnya disinyalir karena perbedaan yang muncul antara pimpinan gerilyawan di wilayah tersebut dan para pemimpin berbasis di luar negeri. Karena perbedaan yang belum terselesaikan ini, banyak militan meninggalkan pemberontakan bersenjata dan kembali ke kehidupan pedesaan yang normal di provinsi-provinsi. Meski begitu, kebencian terhadap regulasi pemerintah terkait asimilasi dan identitas nasional yang dipaksakan tidak sepenuhnya terkikis.<sup>52</sup>

Dekade berikutnya memperlihatkan perkembangan yang besar di wilayah ini. Sebuah lembaga/agen multi-sektoral yang dipimpin warga sipil, Pusat Administrasi Provinsi Perbatasan Selatan (*Southern Border Provinces Administrative Centre* disingkat SBPAC) didirikan pada tahun 1980-an untuk mengelola wilayah tersebut. SBPAC mempertimbangkan budaya dan kebutuhan khusus daerah dengan cara dimana instansi pemerintah Thailand sebelumnya telah gagal melakukannya. Ia menghasilkan beberapa tingkat kemauan baik dari penduduk setempat. Selama hampir satu dekade wilayah itu damai, atau paling tidak tampak begitu. Negara salah mengasumsikan tidak adanya kekerasan berarti telah tercipta perdamaian. Faktanya sebuah generasi

---

<sup>50</sup>. Chumphot Nurakkate, *The Conflict in Southern Thailand*, SIPRI Policy Paper No.20, Centre for Defence and Strategic Studies, Australian Defence College, 2012), hlm. 6.

<sup>51</sup>. Isara News Centre, <http://isranews.org/south-news/stat-history/item/26389-10subjects.html>, diakses pada 4 Maret 2015.

<sup>52</sup>. Don Pathan, *Conflict Management and Resolution in Asia: The Role of Civil Societies in Thailand's Deep South*, hlm. 1

baru sedang dipersiapkan dan keluhan lama akan menciptakan generasi baru yang militan yang akan muncul kembali kurang dari satu dekade kemudian.<sup>53</sup>

Pada awal 1980-an hingga akhir 1990-an, kekerasan di wilayah selatan menurun secara dramatis. Ini terutama karena pendekatan baru pemerintah yang efektif dalam mengurangi kekerasan dengan menekankan partisipasi masyarakat serta pembangunan sosial dan ekonomi dari pada strategi militer murni.<sup>54</sup> Namun, kekerasan di Selatan meningkat secara dramatis setelah Thaksin Shinawatra menjadi Perdana Menteri. Pendekatan keamanan garis keras dan kebijakan administrasinya banyak dikritik.<sup>55</sup>

Thaksin Shinawatra adalah Perdana Menteri pada tahun 2001 hingga 2006. Selama masa pemerintahannya, kepemimpinannya yang keras dan apa yang banyak dilihat orang sebagai kebijakan yang keras, memberikan kondisi kondusif bagi eskalasi kerusuhan. Ketika mengawali pemerintahannya, Thaksin percaya bahwa hanya ada beberapa yang signifikan dari pemberontakan yang tersisa, dan hanya geng kriminal yang terlibat dalam kegiatan ilegal di provinsi selatan. Dengan demikian, ia percaya tindakan terbaik adalah membubarkan SBPAC dan CPM-43 dan menyerahkan semua tanggung jawab kepada polisi. Sayangnya, ini menciptakan kekosongan komunikasi antara pemerintah dan umat Islam di wilayah tersebut.

Pemberontakan kembali terjadi pada akhir tahun 2001, tetapi tidak secara resmi diakui. Berikutnya, tingkat kekerasan mendadak naik pada tahun 2004. Tepatnya pada tanggal 4 Januari 2004 puluhan militan menyerang sebuah kamp militer di Narathiwat. Lebih dari 5.000 orang diyakini telah tewas dalam apa yang telah menjadi konflik Asia Tenggara paling berdarah. Sebelum kejadian Januari 2004, pemberontak dicap sebagai "bandit pipit" bekerja untuk tokoh-tokoh yang berpengaruh dan sindikat kejahatan yang menciptakan gangguan politik dan/atau gangguan keuntungan finansial.<sup>56</sup>

Tidak adanya klaim tanggung jawab atas serangan tersebut menyebabkan multitafsir terhadap kekerasan itu, seperti yang terlihat dalam berbagai penjelasan yang disampaikan oleh sarjana Thailand dan sarjana asing, analis keamanan, dan spesialis terorisme. Tapi premis mendasar dari pemberontakan saat ini bukanlah hal yang baru bila mempertimbangkan konteks historis dari konflik tersebut. Sekarang pemerintah Thailand tidak lagi mengatakan "bandit pipit". Sebaliknya, memandang generasi baru pemberontak sebagai jaringan pemuda Muslim yang marah yang diajarkan tentang sejarah yang terdistorsi dan menganut paham Islam yang "salah". Mereka sering juga dituduh sebagai pedagang dan / atau pecandu obat.<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup>. Ibid., hlm. 1-2.

<sup>54</sup>. Isara News Centre, <http://isranews.org/south-news/stat-history/item/26389-10subjects.html>, diakses pada 4 Maret 2015.

<sup>55</sup>. Pathmanand, U., "Thaksin's Achilles' Heel", in McCargo, D.(ed), *Rethinking Thailand's Southern Violence*, (Singapore: NUS Publishing, 2007), hlm. 70.

<sup>56</sup>. Don Pathan, *Conflict Management and Resolution in Asia: The Role of Civil Societies in Thailand's Deep South*, hlm. 1-2.

<sup>57</sup>. Ibid., hlm. 2

Sejak kembalinya kekerasan pada tahun 2004, bentuk-bentuk terjadinya berubah tergantung pada taktik pemerintah dan para pemberontak. Pada awal kebangkitan kekerasan, dari tahun 2004 sampai pertengahan 2007, gelombang kekerasan meningkat pesat dari serangan gerilyawan yang dipicu oleh insiden brutal di Masjid Se Krue dan pembantaian Tak Bai. Pemerintah menangani konflik dengan menggunakan langkah-langkah kontra agresif. Kebijakan nasional mengenai kekerasan di wilayah paling selatan ini tergantung pada pemimpin negara dan keadaan keseluruhan selama waktu itu. Setelah pendekatan tangan besi digunakan oleh pemerintah Thaksin, pemerintah berikutnya nampak menangani konflik dengan cara yang lebih kompromi. Namun, beberapa pemerintah tidak memasukkan upaya apapun untuk memperbaiki situasi kekerasan di provinsi ini karena mereka memiliki masalah yang lebih mendesak untuk diselesaikan, misalnya, melemahnya ekonomi, krisis politik dan bencana alam.<sup>58</sup>

Militer yang berusaha menahan operasi keamanan dengan proyek berbasis komunitas lokal gagal memenangkan hati dan pikiran warga setempat, membuktikan bahwa niat baik tidak selalu merupakan kebijakan yang tepat, dan bahwa pembangunan belum tentu solusi untuk masalah tersebut. Sayangnya, isu legitimasi negara Thailand di tanah air Melayu Patani yang bersejarah terus diabaikan, serta isu-isu lain, seperti ruang budaya dan kisah sejarah Melayu Patani.<sup>59</sup>

Saat ini, sel-sel militan telah menciptakan sebuah jaringan yang membentang di tiga provinsi paling selatan Pattani, Yala, dan Narathiwat, serta empat kabupaten yang berbahasa Melayu di provinsi Songkhla. Secara signifikan, taktik yang digunakan oleh militan sekarang ini berbeda dari yang digunakan oleh generasi separatis sebelumnya. Generasi baru pejuang ini tidak dibatasi oleh jenis aturan kelembagaan yang mengatur generasi pemberontak sebelumnya. Keputusan untuk menyerang dan pemilihan target sering diputuskan di tingkat sel, secara berkala, sejumlah sel akan melakukan serangan simultan, menciptakan dampak psikologis yang lebih besar.<sup>60</sup>

Pejabat keamanan dan intelijen Thailand cenderung menganggap generasi baru di bawah komando rantai koordinasi organisasi BRN, seenaknya mengabaikan kesenjangan generasi dan tidak adanya perintah-dan-kontrol antara kelompok pengasingan dan militan di wilayah tersebut, yang dikenal sebagai *juwae*, ("pejuang") dalam dialek Melayu setempat. Sumber di BRN-Coordinate dan *juwae* mempertahankan bahwa sementara ada dialog reguler antara penjaga tua dan para pejuang muda di wilayah itu, perintah bersama belum diselesaikan. Situasi yang ideal, menurut sumber-sumber *juwae* dan para pemimpin kelompok separatis lama, adalah untuk melihat seluruh gerakan berevolusi sedemikian rupa dimana militan di wilayah itu menjadi sayap militer, sementara penjaga tua akan berfungsi sebagai front politik. Tapi agar itu terwujud, Thailand harus mengembangkan secara jelas kebijakan tentang masalah negosiasi dengan separatis. Negara-negara tetangga, yaitu Malaysia

---

<sup>58</sup>. Kayanee Chor Boonpunth, *An Analysis of the Role of Civil Society in Building Peace in Ethno-Religious Conflict*, hlm. 3.

<sup>59</sup>. Don Pathan, *Conflict Management and Resolution in Asia: The Role of Civil Societies in Thailand's Deep South*, hlm. 2.

<sup>60</sup>. *Ibid.*, hlm. 2

dan Indonesia, serta Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan fasilitator / mediator potensial lainnya, berpotensi untuk diberikan peran dalam proses perdamaian. Pada dasarnya, Thailand harus memberikan mandat kepada negara-negara ini, serta mediator potensial lainnya, untuk menengahi atau setidaknya memfasilitasi. Tapi Bangkok tidak pernah nyaman dengan ide "Internasionalisasi" masalah dan petinggi negara tidak pernah menyukai ide proses perdamaian formal karena dalam pandangan mereka tidak perlu memberikan modal politik yang diinginkan.<sup>61</sup>

Secara umum, Bangkok terus mempertahankan bahwa konflik adalah masalah dalam negeri dan bahwa militan lebih kurang adalah penjahat yang termotivasi oleh ajaran Islam yang salah dan sejarah yang terdistorsi. Tapi diam-diam selama beberapa tahun terakhir telah terjadi proliferasi inisiatif yang bertujuan mendirikan proses perdamaian formal atau saluran komunikasi. Masalahnya adalah bahwa tidak ada persatuan di antara lembaga Thailand, tidak ada persatuan di antara para pemimpin kelompok lama, dan tidak ada jaminan kontinuitas, terutama pada saat distabilitas politik yang besar di negeri ini. Selain itu, kurangnya kesepakatan tentang apa peran yang dimainkan kelompok separatis lama. Kebanyakan badan-badan keamanan dan intelijen mengatakan mereka lebih suka berbicara dengan militan di balik kekerasan, bukan pemimpin separatis lama yang memproklamirkan diri yang waktunya mungkin telah berlalu dan yang kemampuannya untuk mempengaruhi *Juwae* dipertanyakan. Turut menambah kesulitan adalah fakta bahwa kelompok separatis lama dengan hubungan kerja terbaik dengan *Juwae* - yaitu BRN-Coordinate - telah menolak bertemu secara terbuka dengan broker perdamaian yang potensial. Sampai semua kesenjangan tertutup, prospeknya lumayan baik untuk memulai keberhasilan negosiasi formal, untuk tidak mengatakan kemungkinan sukses.<sup>62</sup>

Sekarang konflik pindah ke fase baru setelah dialog perdamaian resmi dibentuk antara perwakilan pemerintah Thailand dan kelompok BRN di Februari 2013, yaitu pembicaraan damai resmi pertama yang pernah ada. Konflik fase baru ini dipengaruhi oleh dua faktor baru dimana ada perubahan besar dalam taktis pada kedua belah pihak. Yang pertama adalah pengaruh pembicaraan damai yang resmi. Yang kedua adalah tindakan kontra pemberontakan yang diambil pemerintah, terutama dalam operasi intelijen. Kekerasan kini semakin menjadi perjuangan tertutup dengan kenaikan tajam korban pertempuran di kedua sisi: negara dan militan.

## **B. Kemungkinan Penyebab Konflik**

Dalam rangka penyelesaian konflik, akar penyebab harus diperjelas terlebih dahulu. Konflik etno-religius di Thailand Selatan memiliki beberapa penyebab termasuk kepedulian dan kesadaran sejarah, marginalisasi ekonomi, isu-isu politik, perbedaan sosial dan budaya, ketidakadilan kesempatan pendidikan dan diskriminasi peradilan. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait faktor penyebab konflik:

---

<sup>61</sup>. *Ibid.*, hlm. 2-3.

<sup>62</sup>. *Ibid.*, hlm. 3.

**Pertama** sejarah politik yang terdistorsi antara Siam dan Kerajaan Patani menciptakan prasangka di kalangan umat Islam di Selatan dan digunakan untuk memobilisasi sentimen terhadap Negara.<sup>63</sup> Kesultanan Patani, dulunya merupakan negara merdeka terletak di antara Thailand yang menganut Budha dan negara-negara Melayu-Muslim di utara Malaysia. Kesultanan ini merupakan daerah penting karena memungkinkan akses ekonomi oleh pedagang India dan Eropa. Ada banyak sumber daya alam seperti kayu, timah, sutra dan gading di sana. Hampir semua orang di kesultanan ini adalah Muslim, berbudaya Melayu dan berbicara bahasa Melayu, bukan Thai. Konstruksi negara-bangsa Thailand, cerita sejarah dan struktur terpusat lembaga negara Thailand, Beberapa kali tidak mampu dan tidak mau mengakomodir identitas Melayu mereka yang unik dan cerita sejarahnya. Bahkan sejak pergantian abad ke-20, pemerintah Thailand telah menerapkan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengasimilasi provinsi Melayu-Muslim ke dalam tubuh geo-politik Thai yang lebih luas. Melayu lokal di *Deep South* telah menolak upaya ini karena mereka merasa bahwa budaya dan identitas agama mereka yang dipertaruhkan. Rasa keterasingan bertambah oleh kenyataan bahwa wilayah yang bergejolak itu yang biasa disebut sebagai *Deep South*, adalah salah satu daerah yang paling diabaikan.<sup>64</sup> Kebijakan dan kondisi itu mengobarkan emosi separatistis menimbulkan arti bahwa budaya Islam diserang. Anak-anak Muslim di Pattani belajar di pesantren. Pada tahun 1921, UU Wajib Belajar Pendidikan Dasar mengharuskan semua anak masuk ke Sekolah Dasar Negeri selama empat tahun untuk belajar bahasa Thai. Hal ini membuat umat Islam merasa bahwa pemerintah Thailand berusaha untuk mengubah Muslim Melayu ke Thailand. Selama akhir 1930-an, naiknya Marshall Plaek Phibulsongkram menjadi Perdana Menteri (periode 1938-1944 dan 1948-1957) dan promosinya terhadap agenda nasionalisme Thai menyebabkan resistensi dan konfrontasi antara Melayu Muslim dan pemerintah di Bangkok.<sup>65</sup> Resistensi terhadap asimilasi telah mengambil berbagai bentuk dan sebagian didasarkan pada alasan etno-religius, tetapi sebagian pada narasi sejarah-budaya yang melihat klaim negara Thailand sebagai ungkapan dari okupasi dan penjajahan pada abad lalu oleh kekuatan Siam.

**Faktor Kedua** adalah kesenjangan ekonomi. Permasalahan ekonomi dan kemiskinan juga dipandang sebagai penyebab konflik dan pemberontakan di Thailand Selatan, dimana tiga provinsi di selatan adalah yang paling rendah perkembangannya.<sup>66</sup> Meski Thailand Selatan kaya dengan sumber daya alam, dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan namun ekonomi etnis Muslim Melayu di tiga provinsi selatan itu tergolong rendah dibanding provinsi lainnya. Seperti dikemukakan oleh Thnaprarnsing bahwa kinerja ekonomi di Thailand Selatan benar-benar membaik dalam beberapa dekade terakhir. Dengan merujuk pada

---

<sup>63</sup> . Isara News Centre, <http://www.isranews.org/south-news/stat-history/item/26389-10subjects.html> (accessed 4 March 2014)..

<sup>64</sup> . Don Pathan, *Conflict Management and Resolution in Asia: The Role of Civil Societies in Thailand's Deep South*, hlm. 1

<sup>65</sup> . Lihat Colonel Patcharawat Thnaprarnsing, *Solving the Conflict in Southern Thailand*, hlm. 9.

<sup>66</sup> . Aek Tangsupvattana and Ora-orn Poocharoen, *Problems of the Three Southern Border Provinces: Policy Recommendations* (Bangkok: Chula Press, 2009), 121.



Brain Mc Cartan and Shawn W Crispin ia menjelaskan bahwa antara tahun 1983 dan 2003, rata-rata pendapatan per kapita di Pattani tumbuh dari 9.340 Baht menjadi 57.621 Baht, sedangkan di Yala dan Narathiwat juga meningkat dari 14.987 Baht dan 10.340 Baht menjadi masing-masing 52.737 Baht dan 38.553 Baht. Pendapatan rumah tangga meningkat dari tahun 2002-2004 menjadi 21,99%, 19,27%, dan 21,28% masing-masing untuk Pattani, Yala, dan Narathiwat. Persentase orang yang hidup di bawah garis kemiskinan juga turun, dari 40%, 36%, dan 33% di tahun 2000 menjadi 18%, 10%, dan 23% pada tahun 2004 di Narathiwat, Yala, dan Pattani. Pada tahun 2004, tiga provinsi memiliki 310.000 orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. dibandingkan dengan 610.000 pada tahun 2000. Sebagai perbandingan, pertumbuhan pendapatan untuk semua Thailand pada periode yang sama hanya 9,4%. Realitas di atas menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Thailand Selatan. Namun demikian, dibanding provinsi lainnya, tiga provinsi perbatasan yang didiami Melayu Muslim (Pattani, Yala dan Naratiwat) memiliki pendapatan rata-rata terendah di antara semua provinsi-provinsi selatan. Masih banyak masyarakat di sana yang ekonominya tergolong rendah dan berada di bawah garis kemiskinan. Data menunjukkan 45% dari semua orang Selatan yang miskin tinggal di tiga provinsi perbatasan.<sup>67</sup> Bahkan bila dibandingkan dengan keseluruhan wilayah Thailand, wilayah selatan adalah daerah miskin dan sebagian daerahnya masih kumuh.<sup>68</sup> Kesenjangan antara pusat dan daerah pedesaan telah mengakibatkan keterbelakangan ekonomi jauh di Selatan. Selain itu, ada beberapa alasan kemiskinan konstan di kawasan itu seperti tingkat kelahiran yang tinggi dan kurangnya Pendidikan.

**Ketiga**, masalah sosial politik juga menjadi salah satu penyebab lain konflik. Meski Kolonel Patcharawat Thnaprarnsing mengklaim pemberontakan mungkin tidak disebabkan oleh kurangnya perwakilan politik dari kalangan penduduk Muslim. Karena menurutnya pada akhir tahun 1990-an, Muslim pernah memegang posisi senior dalam politik Thailand, misalnya Wan Muhammad Nor Matha (Muslim Melayu dari Yala) menjabat sebagai Ketua Parlemen dari 1996 sampai 2001 dan kemudian Menteri Dalam Negeri pada masa pemerintahan Thaksin pertama. Pemerintah pertama Thaksin (2001- 2005) juga terdiri dari 14 anggota parlemen Muslim dan beberapa senator Muslim. Muslim menurutnya juga mendominasi majelis legislatif provinsi di provinsi perbatasan, dan beberapa kota selatan memiliki walikota Muslim. Muslim menurutnya juga mampu menyuarakan keluhan politik mereka lebih terbuka dan menikmati tingkat yang jauh lebih besar terkait kebebasan beragama.<sup>69</sup> Terlepas dari yang diuraikan di atas, tidak sedikit yang menilai pemerintah gagal merespon kebutuhan masyarakat setempat karena sebagian besar kebijakan publik diputuskan oleh pemerintah pusat tanpa partisipasi dari masyarakat setempat. Hal ini berkaitan juga dengan kesempatan kerja bagi Muslim di bidang pemerintahan. Muslim kurang memiliki kesempatan kerja dibandingkan dengan tetangga Buddhis mereka. Pejabat pemerintah terdiri hanya 2,4% dari semua Muslim

---

<sup>67</sup>. Colonel Patcharawat Thnaprarnsing, *Solving the Conflict in Southern Thailand*, hlm. 9.

<sup>68</sup>. Brain Mc Cartan and Shawn W Crispin, "An Atol Investigation, Southern Test for New Thai Leader".

<sup>69</sup>. Colonel Patcharawat Thnaprarnsing, *Solving the Conflict in Southern Thailand*, hlm.

yang bekerja di provinsi, dibandingkan dengan 19,2% dari semua umat Buddha yang bekerja.<sup>70</sup> Pekerjaan di sektor publik Thailand sulit untuk diperoleh oleh Muslim yang tidak pernah sepenuhnya mendapatkan bahasa Thailand atau sistem pendidikan Thailand. Selain itu serangan gerilyawan terhadap sasaran-sasaran ekonomi juga turut mengurangi kesempatan kerja bagi kaum Muslim.

**Keempat**, perbedaan sosial dan budaya berpotensi menyebabkan ketegangan. Karena identitas Muslim di Selatan berbeda dari warga negara lainnya, masyarakat lokal di wilayah tersebut merasa sangat terhubung dengan orang-orang di Malaysia karena mereka memiliki banyak kesamaan terutama agama, bahasa dan budaya. Selanjutnya, Selatan juga memiliki reputasi karena tingkat kejahatan yang tinggi dan bentuk lain dari bisnis haram. Penyebab kelima adalah masalah pendidikan. 'Pondok', yang menyediakan pembelajaran agama dan akademik, terlihat menjadi ancaman bagi keamanan nasional karena mereka bisa menjadi tempat berkembang biaknya calon Muslim radikal. Selain itu, karena ketidakseimbangan silabus, hanya beberapa lulusan dari Pondok mampu untuk melanjutkan gelar profesional mereka ke lembaga tinggi. Akhirnya, masalah ketidakadilan adalah salah satu faktor yang merangsang konflik di selatan. Karena kurangnya pemahaman negara dan penerimaannya terhadap perbedaan budaya. Masyarakat setempat tidak percaya pada pejabat pemerintah, juga tidak percaya pada sistem peradilan dan tidak mau bergantung pada proses peradilan nasional.<sup>71</sup>

**Kelima**, penyebab ketegangan lainnya adalah ketidak-adilan kesempatan pendidikan. Secara umum, Muslim di provinsi perbatasan memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan tetangga Buddhis mereka; 69,80% dari populasi Muslim di provinsi perbatasan hanya memiliki pendidikan sekolah dasar, dibandingkan dengan 49,6% dari umat Buddha di provinsi yang sama. Hanya 9,20% dari Muslim yang menyelesaikan pendidikan menengah (termasuk mereka yang lulus dari sekolah-sekolah Islam swasta), dibandingkan dengan 13,20% dari umat Buddha. Hanya 1,70% dari populasi Muslim memiliki gelar sarjana, sedangkan 9,70% dari umat Buddha memegang gelar sarjana. Namun, satu hal yang harus diingat bahwa di sekolah menggunakan bahasa Thailand, dan ini tidak disukai oleh Muslim dan bahkan mereka langsung menarik anak-anaknya keluar dari sekolah Thai. Muslim juga kurang memiliki kesempatan kerja dibandingkan dengan tetangga Buddhis mereka. Pejabat pemerintah terdiri hanya 2,4% dari semua Muslim yang bekerja di provinsi, dibandingkan dengan 19,2% dari semua umat Buddha yang bekerja. Pekerjaan di sektor publik Thailand sulit untuk diperoleh oleh Muslim yang tidak pernah sepenuhnya mendapatkan bahasa Thailand atau sistem pendidikan

---

<sup>70</sup>. Brain Mc Cartan and Shawn W Crispin, "An Atol Investigation, Southern Test for New Thai Leader".

<sup>71</sup> Kayanee Chor Boonpunth, *An Analysis of the Role of Civil Society in Building Peace in Ethno-Religious Conflict*, hlm. 4

Thailand. Srgan gerilyawan terhadap sasaran-sasaran ekonomi lebih lanjut mengurangi kesempatan kerja bagi kaum Muslim dan Buddha di tersebut.<sup>72</sup>

**Keenam,** kegagalan pemerintah dalam menangani masalah pemberontak termasuk melarutkan otoritas negara kunci di kawasan itu. Selain itu, pemerintahan jangka pendek membuat sulit untuk menghasilkan hasil yang nyata

Lebih jauh, konflik dan kekerasan yang berkepanjangan di Thailand Selatan selain disebabkan oleh perbedaan pandangan dan kepentingan politik serta perbedaan kultural antara minoritas Muslim dan pemerintah, juga didorong oleh kesenjangan ekonomi, infrastruktur, sarana dan prasarana, fasilitas layanan publik serta kesenjangan peran politik di selatan antara mayoritas warga Thai versus minoritas Muslim. Di Selatan, etnis Thai tergolong kelas ekonomi menengah, bekerja sebagai pemimpin utama lembaga pemerintah, pegawai, atau pengusaha, meskipun mereka minoritas.<sup>73</sup> Hal ini, pada gilirannya menyebabkan tidakpuasan yang seterusnya berimplikasi pada konflik dan kekerasan<sup>74</sup>

Uraian di atas menggambarkan perbedaan yang signifikan antara minoritas Muslim di satu sisi dengan mayoritas non-Muslim dan pemerintah di sisi lain. Mereka tidak hanya berbeda dalam hal kepentingan politik dan kultural yang mencakup agama dan keyakinan, bahasa, dan budaya. Namun demikian, pemerintah pusat tetap memaksakan asimilasi kultural dan integrasi nasional.<sup>75</sup> Yang tidak mematuhi kebijakan itu ditangkap, dipenjarakan bahkan ada yang sampai dibunuh.<sup>76</sup>

Kesenjangan ekonomi, infrastruktur, sarana dan prasarana, fasilitas layanan publik serta kesenjangan peran politik dan pemerintahan antara Thai Budhis dan minoritas Muslim turut pula memperpanjang konflik.<sup>77</sup> Seperti dikemukakan mantan Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan, yang kebetulan berasal dari Thailand selatan, bahwa permasalahan di Thailand selatan tidak bersumber pada agama, namun kesenjangan pembangunan.<sup>78</sup>

---

<sup>72</sup>. Brain Mc Cartan and Shawn W Crispin, "An Atol Investigation, Southern Test for New Thai Leader".

<sup>73</sup>. Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Bandung: Zanafa Publishing kerjasama dengan Nusa Media, 2011), hlm. 232.

<sup>74</sup> Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Bandung: Zanafa Publishing kerjasama dengan Nusa Media, 2011), hlm. 232.

<sup>75</sup>. Deliar Noer dalam M.B. Hooker, *Islam in South-East Asia*, (Leiden: E.J. Brill, 1988), hlm. 211. Pemberontakan di Thailand selatan aktif terutama di provinsi Narathiwat, Pattani dan Yala. Ada juga beberapa kekerasan di bagian Songkhla, terutama di beberapa kabupaten mayoritas Muslim dan di Hat Yai, wilayah komersial dan kota terbesar di Selatan. Provinsi tetangga Satun juga memiliki sebagian besar penduduk Melayu Muslim namun belum terpengaruh secara signifikan. Lihat Neil J. Melvin, *Conflict in Southern Thailand: Islamism, Violence and the State in the Patani Insurgency*, (Sweden: Stockholm International Peace Research Institute, 2007), hlm. 5

<sup>76</sup>. Thanet Aphornasuvan, "Nation-State and the Muslim Identity in the Southern Unrest and Violence," dalam Imtiyaz Yusuf dan Lars Peter Schmidt, eds. *Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand* (Bangkok: KAS, 2006), hlm. 105-110.

<sup>77</sup>. Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Bandung: Zanafa Publishing kerjasama dengan Nusa Media, 2011), hlm. 232.

<sup>78</sup> . <http://www.antaraneews.com/print/111208/pendidikan-perdamaian-solusi-konflik-thailand-selatan>, diakses tanggal 30 Juli 2017.

Hingga kini, ketegangan dan kekerasan sewaktu-waktu masih terjadi disebabkan jalan buntu dialog formal melalui negosiasi politik, dan karena rasa ketidakadilan menimbulkan kekerasan yang berkelanjutan. Hanya intensitasnya yang kadang meningkat dan kadang berkurang. Dari 1979 sampai akhir 2003, 233 kematian dikaitkan dengan kekerasan politik di tiga provinsi Pattani, Yala dan Narathiwat. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, tepatnya pada bulan Ramadhan tahun 2004 terjadi peristiwa berdarah di Takbai yang menyebabkan 78 orang meninggal dunia.<sup>79</sup>

Pada tahun yang sama, pada sebuah masjid di Thailand Selatan kembali terjadi pembunuhan oleh militer terhadap ratusan Muslim. Berikutnya, konflik dan kekerasan silih berganti terjadi. Bahkan menurut perkiraan baru-baru ini ada 4.100 orang meninggal dan 6.509 orang terluka sejak tahun 2004.<sup>80</sup>

Sebagaimana diuraikan di atas, konflik berkepanjangan ini terlibat di dalamnya unsur agama, politik, etnis, yang berhimpitan dengan elemen kedaerahan. Kondisi ini mempersulit proses dialog antar aktor-aktor yang berkonflik, meski beberapa negara turut berkontribusi mencari penyelesaian, seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI), Malaysia, dll.

Dalam kasus minoritas Muslim Thailand, alternatif-alternatif seperti otonomi, atau merdeka terus menjadi pergulatan yang tak sederhana dan mudah. Namun belakangan, proses tersebut menampakkan kecenderungan yang kuat ke arah alternatif otonomi. Namun demikian, otonomi seperti apa yang akan terwujud, tidaklah mudah untuk mendefinisikannya karena mayoritas Thai Budhis dan pemerintah pusat tidak ingin kehilangan wewenangnya atas wilayah tersebut.

Seiring dengan perjalanan waktu dan karena berbagai upaya yang telah dilakukan, baik pemerintah pusat maupun gerakan separatis di Selatan telah mengalami transformasi. Gerakan separatis telah merubah orientasinya “dari tuntutan merdeka ke ‘tuntutan otonomi dan *ancestral domain*”. Pemerintah juga telah bertransformasi dari kecenderungan menggunakan strategi penyeragaman budaya dan

---

<sup>79</sup>. Peristiwa berdarah Tak Bai bermula ketika enam orang laki-laki setempat ditahan pihak militer dan dituduh mempersenjatai pihak pemberontak. Penahanan mereka dibantah oleh penduduk lokal yang kemudian berkumpul dan melakukan unjuk rasa menuntut pembebasan mereka. Unjuk rasa itu menjadi kekerasan fisik ketika pihak militer menembaki mereka dengan gas air mata dan meriam sehingga menyebabkan enam lelaki tersebut mati ditembak. Ratusan warga yang kesemuanya beragama Islam kemudiannya ditangkap dan dibawa dengan truk dalam keadaan terbaring bertindihan ke sebuah camp militer di Pattani. Ketika truk tersebut tiba di Camp tersebut beberapa jam kemudian, sebagian mereka ditemukan telah meninggal dunia akibat sesak nafas karena tidak cukup mendapatkan oksigen untuk bernapas ketika diangkut ketempat penjara yang memerlukan 5 jam waktu perjalanan. Peristiwa berdarah pada 24 Oktober 2004, di bulan Ramadan itu mengundang kecaman internasional dan semakin meningkatkan intensitas konflik dan kerusuhan di Thailand Selatan. Lihat, [https://ms.wikipedia.org/wiki/Peristiwa\\_berdarah\\_Tak\\_Bai](https://ms.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_berdarah_Tak_Bai) diakses pada 12 Juli 2016.

<sup>80</sup>. Srisompob Jitpiromomsri, “*The Southern Thai Conflict Six Years On: Insurgency, Not Just Crime*”, *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Published by Institute of Southeast Asian Studies, Volume 32, Number 2, August 2010, hlm. 157; Brain Mc Cartan and Shawn W Crispin, “An Atol Investigation, Southern Test for New Thai Leader”, [http://www.atimes.com/atimes/Southeast\\_Asia/JL2Aeo2.html](http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/JL2Aeo2.html) (accessed December 23, 2008). Lihat juga Neil J. Melvin, *Conflict in Southern Thailand*, hlm. 9.

politik dan pendekatan represif ke strategi yang lebih bersifat terbuka dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan wilayah selatan dibanding sebelumnya serta menerapkan desentralisasi politik terbatas. Namun, kenyataan ini bisa dikatakan masih jauh dari tuntutan esensial minoritas Muslim Thailand Selatan. Ada sejumlah aspirasi esensial dalam tuntutan Muslim selatan yang belum terpenuhi seperti wewenang penuh terhadap pengelolaan sumber daya alam di Selatan; pemilihan gubernur oleh rakyat setempat secara langsung dan mandiri; otoritas politik terhadap komunitas mereka sendiri. Singkatnya, tuntutan mereka adalah “*self-government* atau *self-determination* minus pemisahan diri”.

### C. *Peace Education* di Universitas Chulalongkorn

Di Universitas Chulalongkorn terdapat program studi perdamaian yang dikenal dengan nama Program Rotary Perdamaian berdurasi 3 bulan yang disponsori oleh *Rotary Club International*.<sup>81</sup> Ini menarik untuk dijelaskan lebih jauh untuk melihat efektivitas program tersebut, menganalisis dan menilai tentang kekuatan potensi pendidikan perdamaian pada program tersebut dalam mentransformasi konflik.

Program Rotary Perdamaian diselenggarakan oleh *Rotary Peace Center* di Universitas Chulalongkorn. *Center* ini didirikan pada tahun 2004. Selain menyediakan program studi perdamaian untuk tingkat sarjana, center ini sejak tahun 2005 juga menyelenggarakan studi perdamaian dua kali setahun dengan durasi 3 bulan perprogram untuk memperoleh sertifikat pengembangan profesional bagi mereka yang bekerja di bidang penyelesaian konflik dan perdamaian. Penelitian ini serta uraian berikut lebih fokus menjelaskan tentang Program Rotary Perdamaian yang berdurasi 3 bulan tersebut.

Program tersebut diselenggarakan pada bulan Januari hingga April dan Juni sampai Agustus setiap tahun dengan maksimum 25 orang peserta di setiap sesi. Sampai penelitian ini dilakukan sudah diselenggarakan lebih dari 23 angkatan.

Penyelenggaraan pendidikan perdamaian ini didasari oleh keyakinan bahwa perdamaian di dunia membutuhkan lebih banyak pencipta perdamaian (*peace builder*). Perdamaian di seluruh dunia dapat ditingkatkan dengan mendukung orang-orang yang memiliki kepedulian dan misi perdamaian serta berkomitmen memperjuangkan perdamaian. Karena itu, *The Rotary Foundation* pada *Universitas Chulalongkorn* menyeleksi para profesional berkualifikasi tinggi untuk mengikuti pelatihan ini untuk menjadi agen perdamaian. Mereka dipilih dari proses seleksi secara ketat dan kompetitif dari banyak pelamar dari berbagai negara. Dengan demikian, pesertanya berasal dari berbagai penjuru dunia. Mereka adalah orang yang bekerja di berbagai bidang namun semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu berkomitmen mempromosikan dan mewujudkan perdamaian di dunia.

### D. Efektivitas Program & Kekuatan Potensinya dalam Transformasi Konflik

---

<sup>81</sup>. Kumpee Thongpoon, *Peace Education in the Universities of Southern Thailand*, (Faculty of Political Science, Hatyai University, Songkhla, November 2013), hlm. 5.

Pendidikan Perdamaian pada Program Rotary ini tergolong efektif dan memiliki mutu yang baik serta memiliki potensi yang kuat dalam transformasi konflik. Efektivitas dan mutu program ini dapat dinilai dari sisi input/komponen-komponen dalam sistem, proses dan outputnya sebagai berikut:

1. Peserta. Pesertanya adalah yang telah memiliki pengalaman kerja 10-30 tahun dan masih aktif dalam bidang perdamaian dan penyelesaian konflik, sehingga apa yang mereka pelajari dapat segera diimplementasikan.<sup>82</sup> Mereka diseleksi secara ketat dari kalangan yang punya komitmen untuk mempromosikan dan bekerja untuk perdamaian dalam skala internasional, sehingga pesertanya berasal dari berbagai penjuru dunia. Saat ini tercatat peserta berasal dari 70 negara.<sup>83</sup> Keragaman konflik yang dihadapi oleh masing-masing peserta dan variasi bentuk resolusi dan strategi transformasi konflik yang diupayakan turut memperkaya pengetahuan dan wawasan peserta lainnya. Karena itu membuat proses *knowledges and experiences sharing* antar peserta menjadi hal yang menarik dan penuh makna. Selain itu, usia peserta rata-rata 42 tahun.<sup>84</sup> Ini adalah usia produktif dimana seseorang memiliki idealisme dan semangat yang tinggi, energi dan kinerja yang baik. Kualitas peserta, komitmen dan kesungguhannya turut berkontribusi pada keberhasilan program ini. Rania Skafi menulis tentang ini sebagai berikut:

"Saya tidak akan pernah melupakan rekan-rekan saya, masing-masing dari mereka adalah unik dalam ide-ide dan orientasi. Masing-masing dari mereka memiliki persepsi nya sendiri yang tentu saja memperkaya hubungan budaya dan agama yang berbeda. Saya seperti dikelilingi oleh ensiklopedia yang lengkap !! Dalam kehidupan, orang membaca banyak buku dan esai dari penulis dan peneliti yang berbeda. Dalam kasus saya memiliki kesempatan untuk bertemu mereka yang seperti mimpi menjadi kenyataan. Saya punya kesempatan untuk bertemu Michel dan Irene, salah satu peneliti khusus tentang manajemen konflik yang pernah saya temui. Hal yang paling penting adalah saya belajar cara analisis konflik sehingga saya dapat menerapkannya di daerah saya. Ini adalah tempat di mana saya berbagi pengalaman saya kepada badan-badan internasional yang berasal dari 17 negara. Saya juga belajar membentuk mereka tentang konflik dan perdamaian. Saya ingin berterima kasih kepada orang-orang yang mendukung saya untuk berada di sini, terutama Rotary International dan manajemen Chulalongkorn University. Saya juga ingin mendorong teman-teman saya yang berasal dari Palestina untuk berpartisipasi dalam kursus unik ini dimana ini menjadi aset bagi saya untuk mulai bekerja bersama-sama membangun perdamaian di negara saya di Palestina".

---

<sup>82</sup>. Rotary Peace Centre at Chulalongkorn University, <https://my.rotary.org> › document › rotary... Diakses tanggal 19 Oktober 2017.

<sup>83</sup>. Rotary Peace Centre at Chulalongkorn University, <https://my.rotary.org> › document › rotary... Diakses tanggal 19 Oktober 2017.

<sup>84</sup>. Rotary Peace Centre at Chulalongkorn University, <https://my.rotary.org> › document › rotary... Diakses tanggal 19 Oktober 2017.

Sebagaimana dijelaskan di atas, peserta program ini meski berasal dari berbagai bidang namun memiliki komitmen yang kuat untuk mempromosikan dan mewujudkan perdamaian. Salah seorang peserta misalnya menuliskan bagaimana komitmennya dalam mewujudkan perdamaian sebagai berikut :

"Melakukan sesuatu yang luar biasa akan menjadi sangat menantang. Ini bisa berarti akan keluar dari zona kenyamanan seseorang, dan membuat pengorbanan besar. Tapi membayangkan masa depan yang damai dan stabil untuk negara saya dan orang-orang, dan mengambil langkah-langkah kecil menuju pemenuhannya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hanya itu hal yang tepat untuk dilakukan. Menutup diri dari dan mengabaikan hal tersebut akan menjadi dosa yang tak terampuni bagi kemanusiaan.... Yang ada di pikiran saya, adalah pernyataan mendalam Filsuf Cina, Laozi yang mengangkat beban saya. Katanya : "Sebuah perjalanan seribu mil dimulai dendengan satu langkah". Saat ini sudah ada jalan kembali. Langkah pertama, saya sekarang harus memulainya"<sup>85</sup>

2. Kurikulum. Kurikulum program ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, pengalaman dan keterampilan tentang bagaimana mengelola dan menyelesaikan konflik baik dalam keluarga, masyarakat, negara dan dunia. Kurikulumnya mencakup materi *Conflict Analysis and Mapping, Conflict Tracking, Conflict Transformation and Peace Building* dengan penekanan pada praktek dan strategi berbasis teori. Ada beberapa modul yang dipelajari, yaitu *Concepts and Values of Peace, Conflict Studies, Diagnosis and Analysis of Conflict, Conflict Resolution Skills, Approaches and Strategies, Conflict Transformation, dan Building Sustainable Peace*.<sup>86</sup> Dalam program ini juga ada *Field Study* tingkat nasional dan internasional (dua kali selama program) berdurasi 6-9 hari. Rozy Rani Sarmah dari India, *fellow* angkatan ke-21 menceritakan bahwa saat Studi Lapangan di Thailand Selatan, anggota 'Jaringan Perempuan Sipil untuk Perdamaian' berbicara kepada mereka tentang bagaimana Al-Quran dijadikan sebagai acuan spiritual bagi perempuan Muslim dalam penyembuhan trauma, serta bagaimana mereka mengatur pekerjaan dan melakukan dialog perdamaian. Demikian pula, pemimpin perempuan dari Jaringan Damai Buddha menyoroti bagaimana etika tradisi agama mereka menjadi kerangka menyeluruh bagi inisiatif perdamaian. Bagi kedua perempuan Muslim dan Buddha di Pattani ini, nilai-nilai agama berfungsi sebagai titik awal dan mempertahankan arsitektur untuk kegiatan perdamaian lokal dan regional. Selain itu, mereka diberi tugas dan kesempatan untuk melakukan refleksi dan menulis artikel. Pada Web *Rotary Peace Center at Chulalongkorn University* dapat diakses artikel yang ditulis oleh masing-masing peserta program ini dari angkatan pertama hingga yang terakhir (angkatan 23). Dengan demikian program ini

---

<sup>85</sup> . Kemuel Laeta, " My Peace Vision", lihat <https://rotarypeacechula.wordpress.com/2017/03/20/my-peace-vision/>, diakses tanggal 25 Agustus 2017.

<sup>86</sup> . Rotary Peace Centre at Chulalongkorn University, <https://my.rotary.org> › document › rotary... Diakses tanggal 19 Oktober 2017.

membuka jalan untuk pelatihan mendalam mengenai perdamaian dan resolusi konflik. Seperti dikatakan oleh Dan Noel Odaba peserta dari Kenya :

“Program ini telah memberi perspektif baru dalam mencoba menganalisis berbagai jenis konflik dengan menggunakan berbagai alat dari konteks yang berbeda baik secara teoritis maupun praktis. Setelah mendengarkan materi dari nara sumber dan berbagai pengalaman peserta lainnya dari berbagai negara tidak hanya memungkinkan saya untuk belajar lebih banyak, tetapi juga memiliki beberapa interaksi dan hubungan profesional dan jaringan kerjasama (*networking*)”.<sup>87</sup>

3. Sumber Daya Manusia (Dosen dan Nara sumber). Terdapat 20-30 orang dosen bereputasi nasional dan internasional yang menjadi narasumber dan instruktur pada program ini pada setiap angkatan.
4. Pendekatan, Metode dan Strategi Pembelajaran : Dalam implementasi kurikulum, terjadi integrasi antara pemahaman materi, studi lapangan dan refleksi serta menulis artikel. Di awal program masing-masing peserta diminta untuk menulis dan mempresentasikan proposal Analisis Konflik Individu (*Individual Conflict Analysis*) sesuai dengan konflik yang dialami masing-masing dan upaya yang telah dilakukan dalam meresolusi konflik. Ini menjadi wadah untuk *knowledges and experiences sharing* antar peserta yang heterogen dengan berbagai latar belakang keilmuan dan pengalaman konflik. Sering sekali peserta tertentu terilhami dan terinspirasi oleh pengalaman peserta lainnya.<sup>88</sup> Kemampuan analisis konflik peserta ini akan dipertajam oleh kerangka teoritis yang disampaikan oleh beberapa narasumber dan pelatihan-pelatihan oleh instruktur yang *qualified* di bidangnya. Dengan demikian program ini membuka jalan untuk pelatihan mendalam mengenai perdamaian dan resolusi konflik.
5. Tata Kelola dan Sistem Manajemen. Banyak faktor yang turut mendukung keberhasilan program ini. Satu diantaranya tidak terlepas dari aspek tata kelola dan sistem manajemennya yang efektif dan para pengelolanya yang profesional, seperti dikemukakan oleh Rania Skafi dari Palestina sebagai berikut :

"Dari saat saya tiba di sini saya menyadari ada persiapan besar dan upaya is sungguh-sungguh yang telah dilakukan oleh kru. Semua bekerja seperti simfoni yang harmonis dalam hubungan dan kinerja yang menunjukkan pengalaman kerja dan distribusi peranyang baik dan kerja sama tim yang terdiri dari orang-orang paling baik yang pernah saya temui".
6. Kesan dan Nilai Pembelajaran bagi Peserta. Ada beberapa kegiatan yang mengesankan dan memberikan nilai pembelajaran bagi peserta di *Rotary Peace* sebagaimana dikemukakan oleh Barbara Servulo Herthel sebagai berikut:

---

<sup>87</sup> . <https://rotarypeacechula.wordpress.com/2017/02/27/my-amazing-journey-as-a-rotary-peace-fellow-in-the-amazing-thailand/> diakses tanggal 15 September 2017.

<sup>88</sup> . Kemuel Laeta, " My Peace Vision", lihat <https://rotarypeacechula.wordpress.com/2017/03/20/my-peace-vision/>, diakses tanggal 25 Agustus 2017.



- a. Proses Aplikasi: Aplikasi adalah pengalaman belajar yang besar pertama bagi peserta. Ini adalah kesempatan untuk refleksi diri, untuk meninjau kisah hidup, pengalaman, dan prestasi, dan juga untuk memahami dan menegaskan urgensi perdamaian.
  - b. Hidup dengan keragaman: peserta memiliki kesempatan besar untuk belajar dari teman-temannya dengan berbagai latar belakang dan pengalaman hidup. Hal ini mendorong seluruh peserta untuk menginstropeksi sikapnya sendiri dan nilai-nilai, yang pada gilirannya membantu untuk memperluas perspektif mereka tentang dunia. Hal ini juga membantu meningkatkan kesadaran diri mereka dan kesadaran mereka tentang orang lain.
  - c. Menyikapi Konflik: konflik tidak perlu ditakuti. Karena itu, program ini memberikan kesempatan belajar menerima dan mempraktekkan resolusi damai terhadap konflik.
  - d. Selama program ini, peserta memiliki akses ke sumber belajar yang baik berupa buku dan referensi, kelas, perjalanan studi lapangan dan pertukaran pengetahuan dengan profesor yang hebat dan sesama rekan-rekan yang menakjubkan.
  - e. Mendapatkan inspirasi: Ini adalah pengalaman yang intens untuk memberikan kekuatan untuk terus bekerja untuk dunia yang lebih adil dan damai. Peserta program akan menginspirasi peserta lainnya karena mereka berbagi cerita dan pengalamannya. Tutor juga menginspirasi dengan penuh kebijaksanaan, kemanusiaan dan menantang masing-masing peserta untuk memikirkan kembali tentang resolusi konflik dan perdamaian.<sup>89</sup>
7. Referensi. Demi mensukseskan program ini, pihak penyelenggara menyediakan referensi dan bahanbacaan dalam bentuk salinan lunak dan keras (*soft file and hard copy*).
  8. Evaluasi. Para peserta program merasa beruntung telah terpilih untuk mengikuti program ini dan merasa sangat terkesan dengan rangkaian kegiatan yang mereka lalui. Cloe Sian Clayton, fellow dari United Kingdom kelas 22, menuliskan kesannya tentang program ini sebagai berikut: "Program ini benar-benar menakjubkan. Betapa banyak pelajaran tentang mengelola diri sendiri yang saya peroleh. Saya memperoleh kesempatan besar untuk merefleksikan emosi, pengalaman, reaksi dan perilaku saya. Kami diminta untuk menulis jurnal di seluruh program, yang menyediakan ruang yang indah untuk refleksi". Selain itu, program ini telah memberi perspektif baru dalam mencoba menganalisis berbagai jenis konflik dengan menggunakan berbagai alat dari konteks yang berbeda baik secara teoritis maupun praktis. Setelah mendengarkan materi dari nara sumber dan berbagai pengalaman peserta lainnya dari berbagai negara, peserta tidak hanya memungkinkan untuk belajar lebih banyak, tetapi juga memiliki beberapa interaksi

---

6. Barbara Servulo Herthel, "Five Reasons to Apply for the Rotary Peace Fellowship" <https://rotarypeacechula.wordpress.com/2016/08/09/5-reasons-to-apply-for-the-rotary-peace-fellowship/> diakses tanggal 14 Mei 2017.

dan hubungan profesional dan jaringan kerjasama (*networking*)".<sup>90</sup> Evaluasi terhadap efektifitas program dapat diarahkan pada capaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Dari sisi domain afektif, program ini menjadi api pembakar semangat para peserta. Seperti dituliskan oleh Jane Wambui Wanjiru, fellow Rotary Perdamaian dari Kenya, "Setelah program ini saya melihat diri saya lebih bersemangat untuk bekerja lebih banyak".<sup>91</sup> Richard Chepsergon dari Kenya menuliskan sikap, minat dan optimismenya yang kuat untuk mempromosikan dan mewujudkan perdamaian sebagaimana berikut:

"Saya sangat percaya bahwa ketika air memotong batu di sungai yang mengalir, itu bukan karena kekuatannya tetapi karena konsistensi. Ini adalah konsistensi, ketahanan dan harapan membangun perdamaian di seluruh dunia. Oleh karena itu, dalam setiap usaha dan tantangan yang kita hadapi dalam resolusi perdamaian dan konflik kita harus konsisten dan memiliki harapan dan tidak pernah menyerah tapi maju. Setelah itu, kami akan memberikan dunia sebuah wajah baru : senyuman."<sup>92</sup>

Peserta lain menilai bahwa program ini juga intensif :

"Intensitas program ini tentu saja telah memberi saya kesempatan untuk berusaha menemukan sesuatu bagi saya yaitu keseimbangan yang 'benar'. Keseimbangan antara di satu sisi bersosialisasi dengan rekan-rekan lain dan di sisi lain ada waktu tenang lainnya untuk sendiri saja merefleksi diri; antara belajar dan menjaga penalaran yang sesuai dan menikmati Thailand; antara berbagi ide dan pengalaman dan mendengarkan orang lain."<sup>93</sup>

Peserta program merasa beruntung telah terpilih untuk mengikuti program ini dan merasa sangat terkesan dengan rangkaian kegiatan yang mereka lalui. Cloe Sian Clayton, fellow dari United Kingdom kelas 22, menuliskan kesannya tentang program ini sebagai berikut:

"Program ini benar-benar menakjubkan. Betapa banyak pelajaran tentang mengelola diri sendiri yang saya peroleh. Saya memperoleh kesempatan besar untuk merefleksikan emosi, pengalaman, reaksi dan perilaku saya. Kami diminta untuk menulis jurnal di seluruh program, yang menyediakan ruang yang indah untuk refleksi ini. Intensitas program ini tentu saja telah memberi saya kesempatan untuk berusaha menemukan sesuatu bagi saya yaitu keseimbangan yang 'benar'. Keseimbangan antara di satu sisi bersosialisasi dengan rekan-rekan lain dan di sisi lain ada waktu tenang lainnya untuk sendiri saja merefleksi diri; antara belajar dan menjaga

---

<sup>90</sup> . <https://rotarypeacechula.wordpress.com/2017/02/27/my-amazing-journey-as-a-rotary-peace-fellow-in-the-amazing-thailand/> diakses tanggal 15 September 2017.

<sup>91</sup> . <https://rotarypeacechula.wordpress.com/2017/03/20/my-peace-vision/>, diakses tanggal 25 Agustus 2017

3. Richard Chepsergon, "My Hope and Expectation of Peace for Humankind", <https://rotarypeacechula.wordpress.com/2016/08/09/my-hope-and-expectation-of-peace-for-human-kind/> diakses tanggal 25 Agustus 2017.

<sup>93</sup> .Cloe Sian Clayton, " Moonlight, emotions and peacebuilding in Bangkok" , <https://rotarypeacechula.wordpress.com/2017/03/20/my-peace-vision/>, diakses tanggal 15 Mei 2017.

penalaran yang sesuai dan menikmati Thailand; antara berbagi ide dan pengalaman dan mendengarkan orang lain."<sup>94</sup>

Program ini juga menjadi api pembakar semangat para peserta. Seperti dituliskan oleh Jane Wambui Wanjiru, fellow Rotary Perdamaian dari Kenya, "Setelah program ini saya melihat diri saya lebih bersemangat untuk bekerja lebih banyak".<sup>95</sup>

9. Alumni. Tujuh puluh lima persen (75%) alumninya saat ini bekerja pada organisasi-organisasi non pemerintah, agen pemerintah, bekerja sebagai akademisi dan peneliti. Sementara sisanya bekerja dalam bidang penegakan hukum, agen, hukum dan jurnalistik PBB. Dengan demikian, program ini memiliki potensi yang besar dalam melakukan transformasi konflik.

## E. Pendidikan Perdamaian di Thailand Selatan

Ada beberapa universitas dan Akademi di Thailand Selatan. Diantaranya adalah *Fatoni University* (FTU), *Prince of Songkla University* (PSU), Yala Rajabhat University, *Islamic Academy and Arab Studies Naradhiwas* dan Pengajian Tinggi Islam Darul Maarif Patani (Petidam). Sebagai sampel dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pendidikan perdamaian di dua Universitas terbesar di Thailand Selatan: *Fatoni University* dan *Prince of Songkla University*.

### E.1. Fatoni University (FTU)

FTU sebelumnya dikenal dengan nama Universitas Islam Yala ketika pertama didirikan pada tahun 1996. Awalnya terletak di sebuah plot 43-rai di distrik Muang, provinsi Yala. Pembangunannya didanai oleh *Islamic Development Bank*. Universitas tersebut didirikan oleh Ismail Lutfi untuk melayani umat Islam di Selatan, dengan tujuan untuk membawa perdamaian ke daerah tersebut. "Satu-satunya cara untuk memecahkan masalah di sini adalah mengenalkan pendidikan ke daerah tersebut," katanya dalam wawancara dengan penulis.

Sebelum universitas ini berdiri, Muslim Thailand yang ingin melakukan studi Islam harus belajar ke luar negeri seperti Arab Saudi atau Mesir. Ismail Lutfi adalah salah seorang mahasiswa yang mengalami hal tersebut. Ia menghabiskan 13 tahun di Arab Saudi dari tahun 1973 sampai 1986, belajar mulai dari tingkat sarjana hingga meraih gelar doktor dalam bidang filsafat.

Selaku mahasiswa luar negeri saat itu ia merasa terisolasi antara lain karena kedutaan Thailand tidak banyak membantu Muslim Thailand di Arab Saudi. "Mereka memperlakukan saya seperti saya bukan warga negara Thailand," kata Ismail Lutfi mengingat bagaimana dia merasa diterlantarkan oleh pemerintah. Pengalaman tersebut membuatnya menganggap penderitaan mahasiswa Thailand lainnya dalam situasi yang sama, dan membuat dia berpikir tentang bagaimana memperbaiki akses terhadap pendidikan Islam berkualitas di dalam negeri sendiri.

---

<sup>94</sup> .Cloe Sian Clayton, " *Moonlight, emotions and peacebuilding in Bangkok* " , <https://rotarypeacechula.wordpress.com/2017/03/20/my-peace-vision/>, diakses tanggal 15 Mei 2017.

<sup>95</sup> . <https://rotarypeacechula.wordpress.com/2017/03/20/my-peace-vision/>, diakses tanggal 25 Agustus 2017

Ismail Lutfi menyadari bahwa membuka sebuah universitas Islam di Thailand bisa menjadi jawaban atas banyak masalah yang ingin dia selesaikan, terutama mewujudkan perdamaian. Dia mulai mengembangkan sebuah rencana untuk mendorong proyek tersebut, tapi tidak semudah yang dia harapkan. Saat pertama kali kembali dari Arab Saudi, dia terus diawasi oleh pemerintah Thailand. Dia terus mengalami tekanan. Ia hampir meninggalkan negara tersebut saat pejabat menuduhnya terlibat dalam sebuah pemberontakan di Thailand Selatan. Tapi ayahnya meyakinkannya untuk tetap tinggal di Thailand dengan terus menjadi anggota masyarakat yang terhormat serta membuktikan kepada petugas keamanan bahwa mereka salah menilai.

Segalanya membaik. Sepuluh tahun setelah pulang ke Thailand dia akhirnya mulai menjalankan rencananya. Ismail Lutfi mendirikan universitasnya di Yala, mengintegrasikan pengajaran Islam dengan pendidikan kejuruan sehingga mahasiswa dapat memperoleh keterampilan hidup (*life skill*).

Universitas dibuka pada tahun 1996 namun tidak disetujui secara resmi sampai tahun 1998, dengan nama *Yala Islamic College*. Mahasiswa pertama berjumlah 200 orang. Mereka belajar Hukum Islam dan Usuluddin, yang merupakan program Studi Islam. Pada tahun 2004, universitas tersebut memindahkan kampus utamanya ke sebuah lahan 200-rai di Pattani, didanai oleh para donator dari Arab Saudi. Mayoritas operasi universitas sekarang dijalankan dari Pattani, sementara kampus Yala menjadi *host* program internasional untuk mahasiswa asing. Saat ini universitas ini memiliki lebih dari 4.000 mahasiswa Thailand dan internasional.

Mayoritas Muslim di Thailand Selatan adalah orang Sunni, namun meski mengikuti faham agama yang sama, masyarakatnya memiliki keyakinan yang berbeda. Sebelumnya yang berkembang antara lain di sini adalah faham Islam radikal dan bersifat nasionalistik. Ketat dalam hal praktek keagamaan dan hukum Islam. Mereka tidak menganggap dirinya sebagai warga Thailand, melainkan sebagai warga Kesultanan Pattani. Kehadiran Universitas Fatoni nampaknya lebih menekankan dan mengajarkan faham Islam moderat, sama ketatnya dalam hal praktek keagamaan dan hukum Islam, namun menekankan pandangan plural dan multikultural serta sikap cinta damai. Paham yang dikembangkan ini bertujuan untuk mendukung umat Islam mengikuti ajaran Alquran, sambil mengadopsi pelajaran dari dunia akademis untuk diterapkan pada kehidupan modern.

## **E.2. Pendidikan Perdamaian (*Peace Education*) di Fatoni University**

Islam selaku agama *salam* (damai) dan *rahmatan lil alamin* menjadi payung dan ideologi yang mendasari segala aktivitas dan program pada Fatoni University dimana studi Islam menjadi intinya (*core*).<sup>96</sup> Apalagi dalam konteks Muslim Thailand ~sebagai minoritas Muslim yang tinggal di negara mayoritas non Muslim~ mereka jadi tertantang untuk menampilkan *the true image of Islam*. Selain itu, *setting* dan kondisi

---

<sup>96</sup>. Wawancara dengan Assc. Prof. Dr. Ismail Lutfi Japakiya, di kampus Fatoni University, Pattani, tanggal 30 Oktober 2017.

sosial politik masyarakatnya yang sudah lama mengalami konflik bahkan tidak jarang terjadi kekerasan fisik yang menyebabkan korban jiwa, membuat para akademisi terpancing untuk mentransformasikan dan menanamkan nilai-nilai dan budaya damai pada mahasiswa dan civitas akademiknya. Dengan demikian mereka diharapkan dapat bersikap dan berperilaku islami dan menjadi *rahmatan lil alamin*. Inilah hakekat damai yang ingin diwujudkan oleh perguruan tinggi ini. Damai tidak dalam arti hanya terbatas pada tidak adanya kekerasan fisik (*negative peace*), tetapi juga dalam arti kehidupan masyarakat yang berkualitas, sejahtera dan tenang lahir dan batin (*positive peace*). Hal ini pada gilirannya akan berimplikasi pada terciptanya suasana damai yang hakikinmengingat seperti yang dikemukakan Ismail Lutfi “Islam sesungguhnya adalah *religion of peace*.”<sup>97</sup>

Di FTU, mata kuliah *Peace Education* menggunakan nama *Peace Study*. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan wajib dipelajari oleh seluruh mahasiswa FTU. Menurut Rektor FTU, Ismail Lutfi Japakiya, FTU adalah satu-satunya universitas di Thailand yang menjadikan *Peace Study* sebagai *General Education* dan wajib dipelajari oleh seluruh mahasiswa. Mata kuliah ini diberikan pada seluruh mahasiswa semester V dari seluruh program studi yang ada. Tahun ini ada 460 orang mahasiswa semester V yang mengambil mata kuliah ini. Karena itu, pembelajaran selalu diselenggarakan dalam kelas besar menyerupai pembelajaran pada *Stadium General*. Karena satu angkatan mahasiswa semester lima menjadi satu kelas besar.

Mata kuliah ini membahas tentang konsep, paradigma dan pemikiran tentang konflik, kekerasan dan pendidikan perdamaian pada tingkat keluarga, komunitas, negara dan dunia. Ia bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan mengelola konflik dengan menggunakan kerangka berpikir studi perdamaian.<sup>98</sup>

Bahan kajian yang menjadi pokok bahasan mata kuliah ini adalah sebagai berikut:

1. Orientasi mata kuliah dan kontrak belajar (penjelasan tentang hakekat mata kuliah, tujuan dan sasaran, pendekatan dan metode pembelajaran, bahan kajian, tugas dan kewajiban mahasiswa, sistem evaluasi dan referensi)
2. Perdamaian (*peace*) perspektif sejarah
3. Perang
4. *Islam the Religion of Peace*
5. Perang dan Damai Menurut Perspektif Islam
6. Manajemen Konflik dan Kategori Manajemen Konflik
7. Strategi Manajemen Konflik di Level Internasional ( disertai contoh Studi Kasus beberapa negara yang mengalami konflik seperti negara-negara Timur Tengah, Irlandia Utara, Myanmar, dll.
8. Konflik dalam Peradaban Romawi: Penyebab, Pendekatan dan Dampaknya.

---

<sup>97</sup>. Wawancara dengan Assc. Prof. Dr. Ismail Lutfi Japakiya, di kampus Fatoni University, Pattani, tanggal 30 Oktober 2017.

<sup>98</sup>. Wawancara dengan Asst. Prof. Solihah Hayisa Ma-ae, di kampus Fatoni University, Pattani Thailand, tanggal 30 Oktober 2017.

9. Konflik dan Kekerasan pada Tingkat Keluarga, Masyarakat dan Negara dengan Mengacu pada perspektif Islam dan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)
10. Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Perspektif Islam dan Permasalahannya di Thailand.
11. *Islam Wasatiyyah*
12. *Ummatan Wahidah*
13. Manajemen Perdamaian : Pendekatan Islam
14. Manajemen Perdamaian dalam Hubungan Muslim dan Non Muslim
15. Perdamaian dalam Perspective Agama dan Akademik.<sup>99</sup>

Pembelajaran mencakup aspek teoritis dan praktek. Pembelajaran teoritis dilaksanakan setiap minggu dengan tatap muka berdurasi 150 menit per tatap muka. Pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dosen menyiapkan materi ajar dan menyajikannya di kelas dengan bantuan media *slide* presentasi. Berikutnya dipertajam dengan diskusi dan tanya jawab. Untuk penguasaan lebih baik, mahasiswa diwajibkan membaca buku referensi antara lain buku *Islam a Religion of Peace* karya Ismail Lutfi Japakiya. Mereka juga diwajibkan membuat dan menuliskan *summary* mata kuliah pada sebuah buku *diary* yang disertai refleksi dengan mengkontekstualisasikannya dengan realitas kehidupan sosial.

Mata kuliah ini diampu oleh *Team Teaching*, terdiri dari beberapa orang dosen termasuk Rektor FTU sendiri, Assc. Prof. Dr. Ismail Lutfi Japakiya, Assc. Prof. Dr. Zakariya Langputeh, Assc. Prof. Dr. Sukree Langputeh, Asst. Prof. Solihah Hayisa Mae. Pokok bahasan yang menjadi tanggung jawab masing-masing dosen disesuaikan dengan konsentrasi keahliannya, misalnya Ismail Lutfi tentang Perang dan Damai menurut perspektif Islam, *Islam Wasatiyyah* dan *Islam the religion of Peace*; Syukree Langputeh pada materi *Conflict in Thailand, Human Right dan Peace Management*; dan Solihah Hayisa tentang Konflik dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Komunitas, dan Negara; Sholeh tentang pengalaman beberapa negara yang mengalami konflik dan upaya resolusi dan transformasi konflik yang ditempuh.

Kegiatan pembelajaran teoritis semakin efektif karena dikombinasikan dengan praktek. Praktek pada pembelajaran mata kuliah *Peace Study* adalah berupa tugas melakukan *project* dengan program *community service* yang substansinya adalah untuk pemberdayaan masyarakat (*society empowering*). Pemilihan tugas *project* dengan program *society empowering* didasari oleh asumsi bahwa meskipun konflik dalam bentuk kekerasan fisik di Thailand Selatan relatif reda, namun ini baru menunjukkan penyelesaian konflik yang baru menghasilkan *negative peace*. *Negative peace* adalah suatu keadaan dimana perdamaian hakiki belum benar-benar tercapai karena masih terdapat beberapa potensi konflik yang dapat timbul dan dapat memunculkan konflik

---

<sup>99</sup>. Dokumen Silabus mata kuliah *Peace Study* di Fatoni University, Pattani Thailand, tahun 2017. Dokumen asli berbahasa Thai, diterjemahkan oleh Assc. Prof. Solihah Hayisa dalam wawancara lisan dengannya ke bahasa Inggris, kampus Fatoni University, Pattani Thailand, tanggal 30 Oktober 2017.

baru yang memiliki dampak yang cenderung lebih besar dan berkepanjangan dibandingkan dengan konflik yang sebelumnya. Oleh karena itu, perlu adanya serangkaian resolusi konflik untuk merubah *negative peace* menjadi *positive peace*. *Positive Peace* adalah kondisi dimana masyarakat tidak hanya sekedar bebas dari perang dan kekerasan fisik, tetapi juga hidup sejahterah dan bahagia lahir dan batin. Karena itu program pemberdayaan masyarakat dipandang efektif mewujudkan hal tersebut. Mahasiswa selaku generasi penerus dipandang perlu memiliki perspektif ini dan berlatih melakukan upaya pemberdayaan masyarakat.

Tugas project ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dirancang secara sistematis. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok terdiri dari 9 sampai 10 orang per kelompok. Masing-masing kelompok dibimbing oleh salah seorang dosen *team teaching* pengampu mata kuliah *Peace Study*. Setiap kelompok berkewajiban mengajukan proposal kegiatan yang berorientasi pada *peace building*. Setelah proses konsultasi dan memperoleh arahan dari dosen pembimbing, mahasiswa turun ke masyarakat dalam rangka *community service* sesuai usulan kegiatan pada proposal. Berikutnya mahasiswa berkewajiban menulis laporan kegiatan tersebut dan mempresentasikannya di kampus sesuai jadwal yang telah diatur oleh koordinator mata kuliah ini. Presentasi ini memperoleh penilaian dari *team teaching* mata kuliah *Peace Study*. Reward diberikan kepada *team / kelompok* yang programnya dinilai dikelola dengan baik, berdaya guna dan dinilai efektif sesuai dengan tujuan mata kuliah *Peace Study*. Beberapa orang mahasiswa bahkan berkesempatan untuk mempresentasikan ke tingkat nasional kegiatan *community service* yang mereka lakukan.

Assc. Prof. Solihah Hayisa, kepada peneliti menyampaikan beberapa contoh *project Community Service* yang dilakukan mahasiswa seperti menanamkan cinta kasih antar sesama melalui penggalangan dana dan pemberian santunan bagi warga panti jompo yang mayoritas non Muslim; peningkatan kompetensi kerja bagi para pemuda penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi dampak narkoba, membangun jalinan persaudaraan dan kebersamaan melalui kegiatan bazar, membangun sikap saling memahami dan silaturrahim antar anggota masyarakat melalui pelatihankegiatan bakti sosial yang melibatkan kedua kelompok anggota masyarakat: Muslim dan non-Muslim, peningkatan kompetensi kerja masyarakat, kemampuan wirausahah dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui kegiatan workshop dan pelatihan kerja.<sup>100</sup>

Selain mata kuliah *Peace Study* juga terdapat mata kuliah lain yang mendukung tujuan *Peace Education*, yaitu mata kuliah *Islamic Way of Life* yang diprogramkan untuk mahasiswa semester V. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk membekali mahasiswa dengan penguasaan domain kognitif, afektif dan psikomotor terkait agama Islam, sehingga mahasiswa bersikap dan berperilaku islami serta menampilkan diri dengan imej positif tentang Islam ( *to express the true image of Islam*).

---

<sup>100</sup>. Wawancara dengan Asst. Prof. Solihah Hayisa Ma-ae, di kampus Fatoni University, Pattani Thailand, tanggal 30 Oktober 2017.

*Peace Study* tidak berdiri sendiri dalam menghantarkan mahasiswa sampai pada tujuan *Peace Education.Life and Hiden Curriculum* di FTU turut mendukung pencapaian tujuan *Peace Education* melalui kegiatan kuliah singkat setelah shalat berjamaah di mesjid kampus. Selain itu, contoh dan keteladanan dari pimpinan eksekutif FTU terutama Rektor dan pimpinan lainnya melalui sikap dan perilaku damai yang mereka tunjukkan, turut serta menanamkan sikap dan perilaku cinta damai pada mahasiswa.

Kuliah singkat adalah berupa kuliah atau *tausiyah* singkat yang dilakukan setelah shalat zuhur berjamaah di mesjid kampus, berdurasi 7-10 menit. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap hari. Rektor, Ismail Lutfi adalah yang paling sering berperan sebagai pemberi materi, selain pimpinan lain dan dosen. Program ini meski singkat namun karena rutin, menjadi efektif dalam mentransformasikan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil alamin* termasuk nilai dan sikap cinta damai. Seperti diakui oleh sang Rektor, kurikulum kegiatan ini belum tersusun secara sistematis. “ Materinya terkait topik apa saja yang teringat seketika menyesuaikan kondisi dan perkembangan yang sedang terjadi saat itu.”<sup>101</sup> Namun demikian, ini tentu kontekstual dan sangat bermakna karena mahasiswa selalu diingatkan untuk memiliki *mind set* yang benar, berpikir positif, bersikap, bertindak dan berperilaku yang benar sesuai dengan panduan ajaran Islam. Salah satu contoh materinya adalah tentang bagaimana agar Muslim dapat menampilkan *the true image of Islam*. Contoh sederhana adalah ketika menggunakan toilet umum, seorang Muslim perlu memastikan diri bahwa toilet ditinggalkannya dalam keadaan bersih dan nyaman digunakan oleh pengguna berikutnya. Sehingga tidak timbul *prejudice* dan *stereotype* tentang Muslim dimana hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan atau memperpanjang konflik. Hal lain yang turut berkontribusi dalam mewujudkan tujuan *peace education* adalah keteladanan pimpinan FTU, terutama Rektor, Assc. Prof. Dr. Ismail Japakiya. Ia adalah sosok kharismatik nan bersahaja yang menjadi panutan civitas akademika FTU. Pola pikirnya yang berorientasi damai berpengaruh secara signifikan pada civitas akademik FTU, khususnya mahasiswa. Rektor ini sangat *low profil* dan cinta damai. Salah satu contoh sikap cinta damai yang ditunjukkannya adalah saat duamahasiswanya yang tak bersalah terbunuh dalam sebuah serangan oleh pasukan keamanan di wilayah Thung Yang Daeng, Pattani, pada 25 Maret 2015. Rektor ini sama sekali tidak memperlihatkan sikap dendam. Meskipun sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Sebagai bentuk ekspresi keprihatinan dan kesedihannya ia mengatakan : “Kami membangun warga yang baik untuk sebuah negara yang lebih kuat, Anda datang dan merubuhkan mereka. Kami dibiarkan hancur.”Itulah pernyataan tegas yang disampaikan oleh Rektor pada tanggal 7 April 2015,dalam kunjunganpermintaan maaf komite militer, polisi dan pemimpin masyarakat.Komite tersebut mencoba menjelaskan mengapa empat pemuda yang tidak bersalah - termasuk dua mahasiswa akhir tahun di Universitas Fatoni - tewas ditembak dalam

---

<sup>101</sup>. Wawancara dengan Assc. Prof. Dr. Ismail Lutfi Japakiya, di kampus Fatoni University, Pattani, tanggal 30 Oktober 2017.



serangan keamanan tersebut. Ismail Lutfi menangis saat menerima permintaan maaf dari Lt Gen Prakarn sembari mengatakan: "Meskipun ini tidak berakhir hari ini, saya setidaknya senang mengetahui bahwa anak-anak kita tidak bersalah".<sup>102</sup>

Cara bertutur katanya yang lemah lembut penuh kasih sayang, sikap supel dan penuh perhatian membuat lawan komunikasinya merasa nyaman dan merasa dihargai.

### E.3. Pendidikan Perdamaian di CIS Prince of Songkhla University (PSU)

*Peace building* menjadi salah satu misi yang diemban oleh College of Islamic SCIS PSU. Hal ini ditegaskan oleh Dr. Ibrahim, Kepala bagian riset dan penjaminan mutu CIS PSU. Misi tersebut diimplementasikan melalui kegiatan darma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, pengajaran, penelitian dan publikasi serta kegiatan pengabdian pada masyarakat. Selain itu, promosi visi dan penanaman nilai perdamaian baik secara implisit maupun eksplisit juga menjadi agenda dalam berbagai konferensi, seminar, diskusi, workshop dan kegiatan akademik lainnya yang diselenggarakan CIS PSU.<sup>103</sup>

Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, terdapat mata kuliah yang substansinya sama dengan *Peace Education* yang diberi nama *Islam and Peace*. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Ia tidak terdapat pada kurikulum program studi lain di CIS kecuali pada kurikulum kelas internasional yang menggunakan bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa pengantar. Pada kelas internasional ini sebagian besar mahasiswanya adalah warga Thailand dan sebagian lainnya mahasiswa asing. Jumlah keseluruhan mahasiswa pada kelas internasional adalah 240 orang. Sementara mahasiswa CIS secara keseluruhan berjumlah 1200 orang. Ini artinya mata kuliah *Islam and Peace* hanya dipelajari oleh 20 persen mahasiswa CIS, yaitu mereka yang kuliah pada kelas internasional saja.

Mata kuliah ini –sebagaimana disampaikan oleh Dr. Ali Samuh– menjadi urgent mengingat masyarakatnya yang multi-etnik, multi-religi dan multi-kultural dan pada saat yang sama masih mengalami konflik. Meskipun kekerasan fisik relatif berkurang, namun potensi konflik –sebagaimana dijelaskan pada bab pendahuluan– masih tergolong besar. Untuk itu diperlukan materi kuliah yang mengedukasi dan membentuk generasi masa depan menjadi aktor-aktor yang memiliki visi perdamaian dan menebarkan perilaku damai dalam komunitas terdekat di lingkungannya ataupun masyarakat global.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup>. Wawancara dengan Dr. Ibrahim Narongraksakhet, CIS PSU kampus Pattani, tanggal 27 Oktober 2017.

<sup>103</sup>. *Bangkok Post*, Teaching peace amid death in the deep South : Two innocent students were killed in a raid by security forces, but Fatoni University in Pattani is intent on ending the cycle of violence, <http://www.bangkokpost.com/print/549611/> diakses tanggal 26 September 2017.

<sup>104</sup>. Wawancara dengan Dr. Ali Mahama Samuh, CIS PSU kampus Pattani, tanggal 27 Oktober 2017. Lihat juga makalahnya atas nama Direktur Wasatiyyah CIS PSU, *Tajaarubu Kulliyat al Dirasat al Islamiyyah bi Jami'at al Amir Songkhla Fi Ta'zizi al Fijri al Wasatiyyi fi Janub Thailand*, dipresentasikan pada Konferensi di Jakarta tanggal 14 Agustus 2017.

Seperti disinggung di atas, mata kuliah *Islam and Peace* memiliki substansi dan arah yang sama dengan *Peace Education*. Ia dirancang untuk menanamkan pandangan tentang perdamaian, merubah orientasi berpikir pihak-pihak yang sedang mengalami konflik agar mereka dapat mengenal satu sama lain dan saling menerima serta menumbuhkan bermacam sikap yang mendukung tercapainya perdamaian seperti sikap empati, simpati, toleransi, saling menghormati, saling menghargai, dan tolong-menolong antar sesama tanpa memandang agama, suku dan golongan. Beda mata kuliah ini dengan subjek *Peace Education* adalah bahwa ia tidak hanyamenggunakan kerangka pikir dan perspektif universal dan multikultural tetapi juga menggunakan perspektif Islam.

Beberapa materi yang dibahas terangkum dalam pokok bahasan sebagai berikut:

1. Perdamaian (*peace*) menurut perspektif Alquran dan Sunnah serta posisinya menurut Islam
2. Perdamaian sebagai identitas agama; perdamaian (*as Salam*) sebagai *Asmaul Husna*; Alquran diturunkan pada *Lailatus Salam*; Nabi Muhammad sebagai *Rasulus Salam*
3. Perdamaian (*as-salam*) adalah salam (*greeting*) Islam, nama surga, ibadah dalam Islam, dan syiar Muslim terhadap orang “Jahiliyah”.
4. Hakekat makna *salam* (Perdamain/ *peace*)
5. Islam dan perang; perang adalah kebutuhan sosial (*dharuriyah ijtimaiyyah*); tujuan perang dalam Islam
6. Perang haram bila bukan karena alasan masa lalu; Islam selalu mengutamakan perdamaian dari pada perang; Islam menganjurkan sikap kasih sayang dalam perang; apakah Islam menganjurkan perang untuk menegakkan kebenaran?
7. Islam dan menjaga lima kebutuhan penting manusia; definisi lima kebutuhan asasi manusia
8. Lima kebutuhan asasi manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
9. Karakteristik lima kebutuhan asasi manusia.
10. *Ishlah* (memperbaikihubungan); *Ishlah* adalah wajib; keutamaan *Ishlah*.
11. Konsekuensi merusak hubungan; sebab-sebab rusaknya hubungan
12. Terorisme; terminologi terorisme; terorisme dalam perspektif Alquran; terorisme dalam terminologi bahasa asing.
13. Benarkah istilah terorisme menurut Islam? Bagaimana terorisme dalam perspektif Islam?
14. Faktor penyebab munculnya terorisme : faktor ekonomi dan sosial
15. Faktor penyebab munculnya terorisme: faktor politik dan agama.<sup>105</sup>

Isi (*content*) mata kuliah dan jumlah kredit semester mata kuliah *Islam and Peace* ini sudah tergolong memadai dan sejalan dengan visi *peace education* yang diharapkan dapat mentransformasikan pengetahuan, sikap dan nilai-nilai serta budaya damai pada mahasiswa. Namun pengaruhnya pada keseluruhan mahasiswa CIS PSU belum tergolong signifikan, mengingat mata kuliah ini hanya dipelajari oleh 240 orang

---

<sup>105</sup>. Dokumen Rencana Program Semester (RPS) atau *Lesson Plan* ditulis oleh dosen mata kuliah terkait, Dr. Ibrahim Lamine Sano, untuk tahun akademik 2016-2017.

mahasiswa kelas internasional saja. Sedangkan mahasiswa dari program studi lainnya yang berjumlah 960 orang lainnya, ditambah lebih kurang 200 mahasiswa tingkat Pascasarjana tidak mempelajarinya karena tidak terdapat pada kurikulum program studinya.

Namun demikian –menurut Ibrahim– meski mata kuliah *Islam and Peace* atau *Peace Education* tidak ada pada Program Studi lain, tidak berarti bahwa *peace building* tidak menjadi concern kurikulum karena sebagian substansi dan tujuan mata kuliah tersebut ada dalam mata kuliah lain seperti mata kuliah *Muslim Way of Life*, *Politik Islam*, *Ekonomi Islam* dan *Hukum Islam*. Mata kuliah ini bersifat lintas prodi dan ditawarkan tidak hanya kepada mahasiswa Muslim tetapi juga kepada mahasiswa non-Muslim. Dengan demikian diharapkan mereka dapat memahami Islam dari berbagai perspektif. Implikasi lebih jauh adalah *mutual understanding* antar masyarakat multi religi, multi kultur dan multi etnis.

Selain itu, ada mata kuliah *Muslim Way of Life* di PSU yang meskipun isinya tidak sama dengan *Peace Education*, namun dapat mendukung tujuan tersebut. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan pada tingkat universitas yang mengajarkan tentang ideologi (aqidah), cara hidup (*muamalah*) dan akhlaq Muslim. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang Islam dan menepis *misunderstanding* tentang Islam dan umat Islam yang sering dikaitkan dengan is radikalisme dan terorisme.<sup>106</sup> Dengan mempelajari hakekat Islam dan kehidupan Muslim diharapkan dapat menepis kecurigaan dan stereotype terhadap Muslim.

Misi *peace building* yang diemban CIS PSU juga disebarakan melalui kegiatan pelatihan dan *capacity building* yang ditujukan pada guru-guruserita program pembelajaran, untuk para guru yang melanjutkan studi di PSU baik pada tingkat sarjana maupun pascasarjana, mengingat peran mereka sebagai *agent of change* dan *agent of transformation* bagi generasi muda.

Di CIS PSU juga terdapat “*Wasathiyyah Center*”. *Wasathiyyah* adalah term bahasa Arab berarti identik dengan keadilan, menunjukkan kemulyaan, keseimbangan dunia dan akhirat.

“*Wasathiyyah* adalah sebuah kerangka berpikir, bersikap dan bertindak laku yang ideal, penuh keseimbangan dan proposional dalam syariat Islam. *Wasathiyyah* adalah sebuah prinsip dasar yang melandasi semua ajaran Islam, baik aqidah, syariah maupun akhlak”.<sup>107</sup>

Selain itu, jika memperhatikan keteraturan tatanan alam semesta, keraaaaapian dan ketertibannya akan didapatkan bahwa semua Allah rancang berdasarkan pilar daaan prinsip *wasathiyyah*, keserasian dan keseimbangan. Pada surah al-Baqarah: 143, “umat Islam disebut sebagai *ummatan wasathan*, umat yang ideal, penuh keseimbangan dan menegakkan keadilan”. Selanjutnya ayat ini dijelaskan oleh ayat lainnya dalam surat Ali Imran: 110 bahwa “maksud *ummatan wasathan* adalah *khoira ummah* (umat

---

<sup>106</sup>. Wawancara dengan Dr. Abdulhakam Hengpiya, di CIS PSU kampus Pattani, tanggal 27 Oktober 2017.

<sup>107</sup>. Wawancara dengan Dr. Abdulhakam Hengpiya, di CIS PSU kampus Pattani, tanggal 27 Oktober 2017.

terbaik). Karenanya, hampir semua ahli tafsir sepakat bahwa *wasatiyyah* mengandung makna yang terbaik, yang ideal, yang seimbang, yang proposional”.

Menurut Ibrahim, konsep ‘*Wasatiyyah*’ tidak persis sama dengan konsep ‘moderat’. ‘Moderat’ berasal dari bahasa Inggris.

“Moderat hanya merepresentasikan posisi-tempat di antara dua ujung yang bertentangan. ‘*Moderate*’ berarti menghindarkan diri dari perilaku yang ekstrim atau sikap yang identik dengan mengambil jalan tengah. Moderat mencerminkan sikap kompromi dengan jalan *win-win solution*, dan dengan demikian kaum oportunist sering menjadikan moderat sebagai pilihan untuk lari dari wilayah yang jelas menuju wilayah yang abu-abu. Maka jelas tidak tepat jika *wasatiyyah* diindentikkan dan dipadankan dengan moderat. *Wasatiyyah* mempunyai kandungan makna esensial yang lebih komprehensif, lebih luas dari sekadar moderat, karena keterikatannya dengan syariat Islam. Sikap ini mestinya sudah melekat pada diri setiap muslim dan siapa saja yang ingin menjadi perekat umat. Tidak fanatik sambil terus belajar dan mendalami agama serta menghindari perdebatan kontraproduktif tentang masalah *khilafiyah ijthadiyah*”.

Sesuai dengan namanya, pusat ini memiliki misi menyebarkan, mempromosikan dan menanamkan nilai, sikap dan perilaku *Islam wasatiyyah* baik kepada civitas akademika maupun masyarakat.<sup>108</sup>

Misi *peace building* oleh para akademisi CIS PSU juga disebarkan melalui *khutbahjumat* baik di dalam maupun di luar kampus. Khutbah Jumat ini juga dipublikasikan ke web dan adakalanya dalam bentuk video yang disebarkan melalui media sosial, sehingga jangkauannya menjadi lebih luas tidak terbatas ruang dan waktu. Penelitian ini juga menemukan bahwa selain mengintegrasikan pendidikan perdamaian ke dalam kurikulum, Prince of Songkla University juga memiliki pusat perdamaian dan studi konflik (*Centre for Peace and Conflict Studies*).

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Pendidikan Perdamaian pada *Rotary Peace Centre* di Universitas Chulalongkorn berjalan efektif. Beberapa komponen dalam sistem pendidikannya dapat menjadi model bagi program pendidikan perdamaian di Thailand Selatan seperti kurikulum, pendekatan, metode dan strategi pembelajaran, serta sistem tata kelola. Program ini memiliki potensi yang kuat dalam mentransformasi konflik mengingat lulusannya dibekali dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang baik dalam meresolusi dan transformasi konflik. Selain itu, efektifitas program tersebut juga terlihat dari eksistensi dan peran lulusannya dalam bekerja sebagai agen perdamaian pada tingkat global. Namun demikian, belum memberikan pengaruh yang signifikan bagi transformasi konflik di Thailand Selatan mengingat program

---

<sup>108</sup>. Wawancara dengan Dr. Ali Samuh, di CIS PSU kampus Pattani, tanggal 27 Oktober 2017.

ini lebih didominasi oleh peserta dari luar negeri dan kembali mengabdikan diri ke negara dari mana mereka berasal.

2. Program pendidikan perdamaian di FTU dan PSU masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu. Keunggulan di FTU adalah pada kebijakan menjadikan *Peace Study* sebagai mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa, iklim religi dan akademik yang kondusif bagi berseminya nilai-nilai cinta damai, adanya role model yang otoritatif terutama dari figur sang rektor dan program pendidikan yang disertai *project* berupa *community service* sebagai ajang untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam memberdayakan dan mendamaikan masyarakat. Namun dilihat dari segi kurikulum, masih belum sistematis dan bersifat komprehensif. Beberapa pembahasan satu sama lain belum terlihat tersambung dan terkesan jumping dari satu tema ke tema lainnya. Sedangkan di PSU, kurikulumnya lebih sistematis dan komprehensif, namun dari segi kebijakan belum mewajibkan seluruh mahasiswa, serta belum adanya tugas dan bentuk kegiatan yang memungkinkan mereka memperoleh keterampilan dalam menangani konflik melalui kegiatan tertentu sehingga kontribusinya tentu kurang optimal dalam mewujudkan transformasi konflik
3. Sejauh yang dapat dijangkau oleh program ini, ia memiliki potensi yang kuat dalam mewujudkan generasi bangsa yang memiliki visi perdamaian dan menebarkan perilaku damai ke dalam komunitas terdekat di lingkungannya ataupun masyarakat global. Realitanya tidak ada satupun alumni dari kedua kampus ini yang terlibat konflik di Thailand Selatan dan apalagi tindakan kekerasan.
4. FTU dan PSU adalah dua kampus terbesar di Thailand Selatan. Ini adalah dua kampus yang memiliki komitmen yang relatif lebih tinggi dalam mempromosikan perdamaian melalui pendidikan perdamaian. Masih terdapat beberapa kampus lainnya di wilayah konflik ini, namun relatif belum memiliki concern terkait pelaksanaan pendidikan perdamaian. Dengan demikian, hanya sedikit kurikulum kampus yang fokus pada pendidikan perdamaian. Inilah antara lain yang menjadi masalah pendidikan perdamaian di Thailand Selatan. Padahal ini dapat menjadi salah satu strategi perdamaian yang potensial dalam mentransformasi konflik.

## Rekomendasi

Meski konflik sudah berlangsung lama di Thailand Selatan, dan sejumlah pakar mengemukakan teorinya mengenai konflik, kekerasan dan perang, dampaknya, serta strategi resolusi dan transformasi konflik, namun masih sedikit program khusus diabdikan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mendidik anak-anak, angkatan muda (mahasiswa dan mahasiswi) mengenai prinsip perdamaian, sehingga dikhawatirkan angkatan selanjutnya mengulang kesalahan yang sama.

Seharusnya pendidikan perdamaian secara umum menjadi pertimbangan dan mendapat dukungan semua pihak di wilayah konflik serta menjadi kebijakan nasional yang diberikan kepada anak-anak dan generasi muda, sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam mewujudkan perdamaian, bukan hanya perdamaian negatif tetapi juga perdamaian positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardizzone, Leonisa, Toward Global Understanding, the Transformative Role of Peace Education. *Journal of Current Issues in Comparative Education*, Vol. 4 (2) 2001.
- Anjarwati, Erna & Trimble, Allison. " Story-Telling as a Means for Peace Education: Intercultural Dialougue in Southern Thailand" *Journal of Living Together, ICERM*.
- Adeymi, Babatunde Adeniyi & Selawudeen, Mujidat Olabisi. The Place of Indegenous Proverbs in Peace Education in Nigeria: Implications for Social Studies Curriculum. *International Journal of Humanities and Social*. Vol. 4 No. 2 January, 2014.
- Ardizzone, Leonisa . *Toward Global Understanding, the Transformatif Role of Peace Education. Journal of Peace Education*, 2001.
- Aphornasuvan, Thanet, "Nation-State and the Muslim Identity in the Southern Unrest and Violence," dalam Imtiyaz Yusuf dan Lars Peter Schmidt, eds. *Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand* (Bangkok: KAS, 2006.
- Brown, Davis, From Pheripheral Communities to Ethnic Nation, *Journal of Pasific Affairs*, 1988.
- Baron, Stephen, John Field, and Sculler edts, *Social Capital: Critical Perspectives*. New York: Oxford University Press Inc. 2000
- Beska, V. *Peace education as a framework for changes in the overall education system*. [Online]. Available at. 2000.
- Boonpunth, Kayanee Chor, *An Analysis of the Role of Civil Society in Building Peace in Ethno-Religious Conflict: A CaseStudy of theThree Southernmost Provinces of Thailand*, Paper prented at the PSA 64<sup>th</sup> Annual International Conference, Manchester, UK, April 2014.
- Center for Research on Peace and Development, *The Politics of Peace Education in Post Conflict Countries*, Lynn Davies, University of Birmingham, UK, 2015
- Cartan, Brain Mc and Crispin, Shawn W. "An Atol Investigation, Southern Test for New Thai Leader", [http://www.atimes.com/atimes/Southeast\\_Asia/JL2Aeo2.html](http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/JL2Aeo2.html) (accessed December 23, 2008.
- D. Corkalo, (2000). *Challenges for peace education in new demoncracies: The case of Croatia*. [Online]. Available at: <http://construct.haifa.ac.il/~cerpe/papers/corkalo.html>;
- Duffy, T. (2000). "Fragile steps": *Forging a culture of peace in Northern Ireland*. [Online]. Available at: <http://construct.haifa.ac.il/~cerpe/papers/duffy.html> ;
- Dietrich, Wolfgang/ Wolfgang Sutzl. (1997). *A Call for Many Peaces*, Peace Centre Burg Schlaining, November.
- Daniel Bar-Tal, The elusive nature of peace education. January, 2002. *Online Journal*, Available at: <http://www.tau.ac.il/~daniel/pdf/39.pdf>.
- Engvall,Anders. *The Dynamics of Conflict in Southern Thailand*, Stockholm School of Economic Asia working paper, No. 33, Oktober 2014, hlm. 6-8.

- Furlong, Gary T. (2005). *The Conflict Resolution Toolbox: Models & Maps for Analyzing, Diagnosing, and Resolving Conflict*. Ontario: John Wiley & Sons Canada, Ltd. Available at :<http://www.beyondintractability.org/essay/transformation>.
- Fountain, Susan. (1999). *Peace Education in Unicef, Newyork*.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Seabury Press.
- General Assembly United Nation, *Promotion and Protection of the Rights of Children, Impact of armed conflict on children*, Fifty-first session, Item 108 of the provisional agenda, A/51/306 26 August 1996.
- Helmiati. (2011). *Sejarah Islam Asia Tenggara*, Bandung: Zanafa Publishing kerjasama dengan Nusa Media.
- Haavelsrud, M. *Education in developments*. Arena: Norway, 1996.
- , (Ed.), *Disarming: Discourse on violence and peace*. Norway: Arena.
- Hicks, David. (Ed.) *Education for peace, Issues, Principles and Practices in the Classroom*, London: Routledge, 1988.
- Harris, Ian., *Peace Education Theory*. *Journal of Peace Education*. 2007.
- Hooker, M.B, *Islam in South-East Asia*, Leiden: E.J. Brill, 1988,
- Kester, Kevin. (2010). *Education for peace: Content, Form, and structure: Mobilizing Youth for Civic Engagement*. *Peace & Conflict*.
- Lederach, John Paul. *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures*, Syracuse University Press, 1995.
- (2003). *The Little Book of Conflict Transformation; Clear Articulation of the Guiding Principles By a Pioneer in The Field*, Skyhorse Publishing.
- , dalam Michelle Maiese, “*Conflict Transformation*”, online journal *Beyond Intractabilty*, Oktober 2003.
- Lutfi, Ismail, *Ummatauh Wahidah, Dasar-dasar Hidup Ahli As Sunnah wa Aljamaah. Menyebar Rahmat Allah ke Alam Sejagat*, Cet. III, Pustaka Darussalam, Malaysia, 2016.
- Man, W.K. Che(1990). *Muslim Separatism the Moros of Southern Philipines and the Malays of Southern Thailand*, (Manila: Ateneo de Manila University Press.
- Melvin, Neil J., *Conflict in Southern Thailand: Islamism, Violence and the State in the Patani Insurgency*, Sweden: Stockholm International Peace Research Institute, 2007.
- Machalli, Imam. *Peace Education dan Deradikalisasi Agama*, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume II, Nomor 1, Juni 2013.
- Murdzeva-Skarik, O, *University peace workers have a challenging anxiety in the Balkans*. *Peacebuilding*, 2(4), 5-7. 2000
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurakkate, Chumphot. (2012). *The Conflict in Southern Thailand*, Centre for Defence and Strategic Studies, Australian Defence College.
- Pitsuwan, Surin. (1989). *Islam and Malay Nationalism: A Case Study of the Malay Muslims of Southern Thailand*, terj. Hasan Basri, Jakarta: LP3ES.

- Pridmore, Pat, Priya Coomaraswamy, Vesna Dejanovic, *Partisipasi Anak-Anak Dalam Situasi Konflik dan Bencana dalam Anak-Anak Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta, REaD Book, 2002.
- Reardon, B.A. (1988). *Comprehensive peace education: Educating for global responsibility*. New York: Teachers College Press.
- Reardon, B.A. (1999). *Peace Education: A review and projection*. Sweden: Malmö University.
- Srisompob Jitpiromomsri, "The Southern Thai Conflict Six Years On: Insurgency, Not Just Crime", *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol. 32, Number 2, August 2010.
- Thongpoo, Kumpee. (2013). *Peace Education in the Universities of Southern Thailand*, Faculty of Political Science, Hatyai University, Songa.
- Thnaprarnsing, Patcharawat. (2009). *Solving the Conflict in Southern Thailand*, USAWC Strategy, Research Project, U.S. Army War College.
- Trigeorgis, M. Hadjipavlou. (2000). *A partnership between peace education and conflict resolution: The case of Cyprus*. [Online]. Available at: <http://construct.haifa.ac.il/~cerpe/papers/mariaht.html>.
- Thoresen. Alberto Valiente. (2005). *Theorizing Peace Education: A Theoretical Survey of the Practice of Peace Education*, Thesis, University of Tromsø.
- V & Toh, S. (1993). From the mountains to the seas: Education for a peaceful Philippines dalam M. Haavelsrud (Ed.), *Disarming: Discourse on violence and peace*. Norway: Arena.
- Yamane, K. (1996). A peace museum as a center for peace education: What do Japanese students think of peace museums? dalam R. Burns & R. Aspeslagh (Eds.), *Three decades of peace education around the world: An anthology*. New York: Garland Floresca-Cawagas.
- Zaini, Hisyam, dkk. (2005). *Desian Pembelajaran di Perguruan Tinggi*, CTSD, Yogyakarta.
- General Assembly United Nation, *Promotion and Protection of the Rights of Children, Impact of armed conflict on children*, Fifty-first session, Item 108 of the provisional agenda, A/51/306 26 August 1996.
- The Hague Appeal for Peace Conference' May 11-15, 1999*, Report from Ann Abror Delegation, online, available at <http://www-personal.umich.edu/~lormand/agenda/9907/16.pdf>;
- Muslim Population by Country: How Big will each Muslim Population be by 2030*, theguardian.com; *Islam by Country*, en.m.wikipedia.org, diakses tanggal 6 April 2016.
- Isara News Centre, <http://www.isranews.org/south-news/stat-history/item/26389-10subjects.html> (accessed 4 March 2014).
- Dokumen Silabus mata kuliah *Peace Study* di Fatoni University, Pattani Thailand, tahun 2017.
- Dokumen Rencana Program Semester (RPS) atau *Lesson Plan* ditulis oleh dosen mata kuliah terkait, Dr. Ibrahim Lamine Sano, untuk tahun akademik 2016-2017.



*Bangkok Post*, Teaching peace amid death in the deep South : Two innocent students were killed in a raid by security forces, but Fatoni University in Pattani is intent on ending the cycle of violence, <http://www.bangkokpost.com/print/549611/> diakses tanggal 26 September 2017.

*The Mapping and Analysis of Human Rights and Peace Education in Southeast Asia*, Mahidol University of Human Right and Peace Studies, Asean University Network, 2013.